

**PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PT SEMEN BOSOWA MAROS DI KABUPATEN MAROS**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.) Jurusan Ilmu Hukum  
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

oleh

**IKHWAN SETIAWAN**

**10400114142**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

**HALAMAN JUDUL**

**PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT**

**SEMEN BOSOWA MAROS DI KABUPATEN MAROS**

**OLEH**

**IKHWAN SETIAWAN**

**10400114142**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

**MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 02 Agustus 2018

Penyusun,



**IKHWAN SETIAWAN**

**NIM: 10400114142**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros" yang disusun oleh Ikhwan Setiawan, NIM: 10400114142, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 M, bertepatan dengan 24 Dzulkaidah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 6 Agustus 2018 M.  
24 Dzulkaidah 1439 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.	(.....)
Penguji I	: Dr. Andi Safriani, S.H., M.H.	(.....)
Penguji II	: Eman Sulaiman, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Marilang, S.H., M.Hum.	(.....)
Pembimbing II	: Istiqamah, S.H., M.H.	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar.



Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621916 199003 1 003

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah*, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terucap untuk *Nabiullah* Muhammad saw. Yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat di bangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penyusun memilih judul **“Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros”**.

Kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi semua pihak, baik dalam sugesti dan motivasi moril maupun materil. Karena itu penyusun berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua penyusun Ibunda tersayang **Adriana, A.MD** yang selalu membantu dan

menyemangati saya melalui pesan-pesan dan kasih sayang yang luar biasa dari beliau dan ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ayahanda **Drs. Salman M.** yang selalu tiada henti memberikan semangat, motivasi, bantuan moril dan materil serta do'a restu bagi penyusun dari sejak awal melaksanakan studi sampai selesai. Serta ucapan terima kasih juga kepada saudara kandung saya **Dian Hafidzah Sari** dan **Anshari Ramadhan** yang juga selalu memberikan semangat kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

Secara berturut-turut penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para Pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawan.
2. **Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.** sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penyusun.
3. **Ibu Istiqamah, S.H., M.H** selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan **Bapak Rahman Syamsuddin, S.H., M.H** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum serta Staf Jurusan Ilmu Hukum **Bapak Amiruddin, S.H., M.H** dan **Kakak Herawati, S.H** atas izin, pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. **Bapak Dr. Marilang, S.H., M.Hum** selaku pembimbing I dan **Ibu Istiqamah, S.H., M.H** selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penyusun dalam perampungan penyusunan skripsi ini.

5. Ibu **Dr. Andi Safriani, S.H., M.H** selaku penguji I dan Bapak **Eman Sulaiman, S.H., M.H** selaku penguji II yang telah menguji, memberikan nasehat, saran dan mengarahkan penyusun dalam perampungan penyusunan skripsi ini.
6. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
7. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penyusunan skripsi ini.
8. Untukmu **Nur Fitriani Halim** yang selalu mendoakan, menghibur dan memberikan support dikala penyusun lelah dalam menyusun skripsi.
9. Sahabat-sahabat **JJK, Rahmatullah, S.H, Feradika Hardiyanti, S.H, Sri Kasmirawati Dewi, S.H, Andi Resky Darmawan, Muh. Ridjal Syam, Irwandy Syam, Samsir, Maulana Arqam** yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penyusun.
10. Seluruh rekan-rekan seperjuangan **Ilmu Hukum C Angkatan 2014** yang tak sempat penyusun sebutkan satu persatu yang selalu memberikan warna selama perkuliahan dari awal hingga akhir kalian adalah teman seperjuangan yang luar biasa.
11. Dan kepada teman-teman, sahabat, adik-adik yang tidak sempat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini, mohon dimaafkan dan kepada kalian diucapkan terima

kasih. Upaya maksimal telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. *Amin yaarabbalamin.*

*Billahi taufik wal hidayah*

***Wassalamu Alaikum Wr. Wb.***

Samata, 29 Juli 2018

Penyusun,

Ikhwan Setiawan

NIM: 10400114142





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1-14
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	11
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15-44
A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas .....	15-31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas .....	15
2. PT Sebagai Badan Hukum .....	19
3. Pendirian Perseroan Terbatas .....	21
4. Jenis Perseroan Terbatas .....	24
5. Organ Perseroan Terbatas .....	25
B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) .....	31-38
1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) .....	31

2. TJSL Merupakan Tren Baru .....	32
3. TJSL Hanya Terbatas Atas Perseroan Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Di Bidang Sumber Daya Alam .....	34
4. CSR Sebagai Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan .....	36
C. Asas Keputusan Dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perseroan .....	38-43
1. Konsep Keputusan Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	38
2. Konsep Keputusan dalam UUPT jo. PP T.J.S.L. ....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	45-49
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Sumber Data .....	46
D. Metode Pengumpulan Data .....	46
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50-82
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	50-63
1. Sejarah Singkat PT Semen Bosowa Maros .....	50
2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Semen Bosowa Maros .....	53
3. Struktur Organisasi Perusahaan .....	54
4. Profil Community Development PT Semen Bosowa Maros .....	58
5. Visi dan Misi Community Development PT Semen Bosowa Maros.....	60
6. Struktur Organisasi Community Development .....	61

B. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros .....	63
C. Perwujudan Pelaksanaan Program T.J.S.L. PT Semen Bosowa Maros Di Kabupaten Maros .....	70
BAB V PENUTUP .....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Implikasi Penelitian .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN .....	83
SURAT KETERANGAN PENELITIAN .....	87
SURAT PERNYATAAN WAWANCARA .....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	90



## **ABSTRAK**

**NAMA : IKHWAN SETIAWAN**  
**NIM : 10400114142**  
**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT SEMEN BOSOWA MAROS DI KABUPATEN MAROS**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan PT Semen Bosowa Maros dan juga untuk mengetahui sejauh mana perwujudan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros.

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif-empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Dengan kata lain, apakah ketentuan undang-undang atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan data-data yang diperoleh, maka diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Bentuk Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros dibagi ke dalam dua jenis bentuk bantuan yaitu bantuan dana dan bantuan semen. Dalam pelaksanaan aktivitas bantuan dananya PT SBM membagi menjadi empat kategori, yaitu: sosial dan ekonomi, pendidikan, keagamaan serta lingkungan. (2) Adapun perwujudan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros memperoleh persentase 60 % . Nilai persentase ini menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Bosowa Maros masuk dalam kategori kurang, dengan kesimpulan bahwa penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Bosowa Maros kurang terlaksana dan tidak sesuai dengan program yang telah dianggarkan.

Implikasi dari penelitian ini yaitu di harapkan: (1) Agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Bosowa Maros lebih efektif, sebaiknya PT

SBM melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap kebutuhan mendesak masyarakat yang perlu mendapatkan prioritas bagi mereka, seperti kegiatan kepemudaan, penyediaan air bersih, penangkaran debu, serta pemeliharaan jalan/jembatan/irigasi. (2) PT Semen Bosowa Maros sebaiknya melaksanakan sepenuhnya program yang telah direncanakan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan agar program T.J.S.L. tersebut lebih berkualitas dan tepat sasaran serta masyarakat pun dapat diuntungkan.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan seorang manusia akan terasa hampa jika tidak ada orang lain yang membantu, menolong dan menghibur. Antara individu dengan individu yang lain hendaknya terjalin komunikasi yang baik. Seorang manusia di mana ia bertempat tinggal harus mampu bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya agar dapat melangsungkan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat tersebut. Firman Allah swt. dalam Qur'an Surah al-Imran/3:104 yang menyatakan:<sup>1</sup>

مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

Terjemahnya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS.Al-Imran/3:104)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir Makna yang dimaksud dari ayat ini adalah hendaklah ada segolongan orang dari kalangan umat ini yang bertugas untuk mengemban amanah tersebut, sekalipun urusan tersebut memang diwajibkan pula atas setiap individu dari umat ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran Keluarga* (Bandung:Kemenag: 2012), h. 63.

<sup>2</sup>Ibnu Katsir, *Sekilas Tafsir ali Imran ayat 104*. <https://muhammadhaydar.wordpress.com/2011/01/25/sekilas-tafsir-ali-imran-ayat-104/>, diunduh pada hari rabu 18 juli 2018 pukul 22.50.

Begitupun dengan lingkungan, pada hakikatnya suatu lingkungan yang aman, tentram dan damai didukung oleh keadaan masyarakat dan jiwa individu yang ada dalam masyarakat tersebut. Masyarakat yang mampu menjaga dan memelihara lingkungannya sedemikian rupa merupakan masyarakat yang telah bertanggung jawab kepada lingkungannya, dengan kata lain masing-masing individu dalam masyarakat tersebut mampu menjaga terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungannya. Pada dasarnya Allah telah memelihara lingkungan alam semesta dengan begitu indah, namun manusialah yang merusak keindahan lingkungan tersebut, dan ini merupakan perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Firman Allah swt. dalam Qur'an Surah Ar-Rum/30:41, yang menyatakan:<sup>3</sup>

فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.  
ظَهَرَ الْفَسَادُ

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rum/30:41)

Menurut tafsir al mu'tabar, QS Ar-Rum ayat 41 menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi tidak lain karena ulah manusia itu sendiri yaitu melakukan peperangan di luar koridor syariat Allah. Dalam peperangan itu manusia membunuh manusia yang oleh Allah dilindungi hak hidupnya, bahkan merusak segala tatanan alam yang ada. Menurut tafsir kontemporer ayat tersebut bisa menjadi dalil tentang kewajiban

---

<sup>3</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran Keluarga* (Bandung:Kemenag: 2012), h. 408.

melestarikan lingkungan hidup, sebab terjadinya berbagai macam bencana juga karena ulah manusia yang mengeksploitasi alam tanpa diimbangi dengan upaya pelestarian.<sup>4</sup>

Kemudian pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan salah satu tujuan tersebut, yaitu memajukan kesejahteraan umum dalam arti mensejahterakan kehidupan rakyat, cara yang dapat dilakukan adalah dengan bantuan dari salah satu pilar pembangunan ekonomi, yakni perusahaan. Sebagaimana diketahui bahwa pilar pembangunan ekonomi dalam suatu negara tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Perusahaan yang mempunyai peran seperti tersebut di atas juga mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam suatu negara.

Perusahaan didirikan dengan harapan untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, dan salah satunya adalah memiliki kemampuan untuk terus memproduksi dengan tetap berpegang kepada komitmennya kemampuan sosial

---

<sup>4</sup> QS Ar-Ruum ayat 41, *Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup*. [Tehtawarpakees.blogspot.com/2012/05/pendidikan-agama-islam.html?m=1](http://Tehtawarpakees.blogspot.com/2012/05/pendidikan-agama-islam.html?m=1), diunduh pada hari rabu 18 juli 2018 pukul 23.24 wita.



perusahaan seperti mengendalikan dampak lingkungan, menggunakan tenaga kerja dari lingkungan di sekitarnya, dan aktif melakukan kegiatan sosial. Hadirnya perusahaan di tengah-tengah masyarakat mempunyai implikasi yang sangat luas, selain dibutuhkan dalam memacu pembangunan yang sedang dilaksanakan yang akan membawa dampak positif dan negatif.<sup>5</sup>

Selanjutnya pada Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 juga diatur mengenai perihal tanggung jawab, baik sosial maupun masyarakat, yang menyatakan :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>6</sup>

Juga pada pasal 28 H ayat (3) yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.<sup>7</sup>

*Corporate Social Responsibility and Environment* adalah istilah yang seringkali dipakai berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (selanjutnya disingkat T.J.S.L.) oleh perusahaan. Tanggung jawab ini secara umum diatur dalam undang-undang perseroan terbatas (UUPT) yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, yang disebut dalam ketentuan pasal 1 angka 3 yaitu:

---

<sup>5</sup> Eni Suastuti, *Rechtidde Jurnal Hukum: Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR*, (Vol. 9, No. 2, Desember 2014), h. 205.

<sup>6</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, [www.dpr.go.id/jdih/uu1945](http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945) diunduh pada hari Kamis 19 Juli 2018 pukul 20.55 wita.

<sup>7</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, [www.dpr.go.id/jdih/uu1945](http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945) diunduh pada hari Kamis 19 Juli 2018 pukul 20.57 wita.

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.<sup>8</sup>

Defenisi dalam pasal 1 tersebut hanya menyebutkan bahwa T.J.S.L. adalah komitmen dari perusahaan. Ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan T.J.S.L. dinyatakan dalam pasal 74 ayat (1), yang menyatakan:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab, sosial dan lingkungan”.<sup>9</sup>

Selanjutnya dalam pasal 74 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.<sup>10</sup>

Jika demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan secara terencana. Undang-undang ini sendiri tidak memberikan jenis sanksi secara khusus jika perusahaan tidak melaksanakan T.J.S.L.

Undang-undang lain yang dapat dikatakan juga mengatur tentang T.J.S.L. adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung:Citra Umbara, 2013), h. 3.

<sup>9</sup> Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung:Citra Umbara, 2013), h. 42.

<sup>10</sup> Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung:Citra Umbara, 2013), h. 42.

Batubara (UU Minerba). Meskipun tidak menggunakan istilah yang sama, namun dalam Pasal 108 UU Minerba dinyatakan:

“Pemegang Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disingkat IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (selanjutnya disingkat IUPK) wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, penyusunan program tersebut dikonsultasikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat”.<sup>11</sup>

Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 108 UU Minerba terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat PP No.23/Th.2010), tepatnya dalam Pasal 106-108.

Pasal 106 PP No.23/Th.2010 menegaskan:

“(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK. (2) Program tersebut harus dikonsultasikan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat setempat. (3) Masyarakat setempat dalam hal ini dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati/walikota setempat untuk diteruskan kepada pemegang IUP atau IUPK. (4) Pengembangan dan pemberdayaan diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan”. (5) Prioritas masyarakat merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten. (6) program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP atau IUPK setiap tahun. (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dikelola oleh pemegang IUP atau IUPK.”<sup>12</sup>

Berikutnya Pasal 107 PP No.23/Th.2010 memberikan pengaturan bahwa:

<sup>11</sup> UU-4-Tahun-2009.Pdf, h. 39. [Eiti.ekon.go.id](http://Eiti.ekon.go.id) diunduh pada Kamis 26 Juli 2018 pukul 21.32 wita.

<sup>12</sup> PP No. 23 Thn 2010.Pdf, h. 54. [Jdih.esdm.go.id](http://Jdih.esdm.go.id) diunduh pada Kamis 26 Juli 2018 pukul 21.53 wita.

“Pemegang IUP dan IUPK setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan”.<sup>13</sup>

Selanjutnya dalam redaksi pasal 108 PP No.23/Th.2010 menyatakan:

“Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 bulan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”.<sup>14</sup>

Selanjutnya peraturan pelaksanaan T.J.S.L. secara khusus diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah yang terdiri dari sembilan pasal ini, bisa dikatakan hanya sedikit memperluas gambaran tentang apa yang dimaksud T.J.S.L. Perusahaan. Pada Pasal 2 disebutkan:

“Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”<sup>15</sup>

dan juga pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di

<sup>13</sup> PP No. 23 Thn 2010.Pdf, h. 54. [Jdih.esdm.go.id](http://jdih.esdm.go.id) diunduh pada Kamis 26 Juli 2018 pukul 21.53 wita.

<sup>14</sup> PP No. 23 Thn 2010.Pdf, h. 54. [Jdih.esdm.go.id](http://jdih.esdm.go.id) diunduh pada Kamis 26 Juli 2018 pukul 21.54 wita.

<sup>15</sup> Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung:Citra Umbara, 2013), h. 394.

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”.<sup>16</sup>

Tanggung jawab sosial disebut melekat pada setiap perusahaan, namun secara khusus kewajiban diletakkan pada perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Maksudnya adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara langsung ataupun perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah ini kemudian mengatur mekanisme proses keputusan T.J.S.L. dalam perusahaan, namun tetap tidak memberikan ketentuan yang lebih memadai mengenai apa saja yang menjadi ruang lingkup T.J.S.L., perusahaan-perusahaan yang bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, serta siapa yang mengawasi pelaksanaan T.J.S.L. oleh perusahaan.

Ketentuan Pasal 74 UU PT yang mengatur tentang T.J.S.L. muncul karena merupakan kekhawatiran dari pembentuk UU terhadap perusahaan akan tidak dilaksanakannya T.J.S.L. tersebut. Pihak perusahaan akan lepas tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam mengelola lingkungannya dengan mengemukakan beribu alasan agar tidak mengeluarkan biaya. Mengingat kekuasaan cenderung bersifat korup dan disalahgunakan yang juga berlaku bagi perusahaan dengan

---

<sup>16</sup> Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung:Citra Umbara, 2013), h. 394.

kekuatan modal yang sangat besar. Oleh karena itu, sistem hukum sangat diperlukan untuk membatasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mengingat tatanan ekonomi dan sosial tidak dapat diserahkan hanya pada kesadaran moral semata dari pemilik perusahaan.<sup>17</sup>

Contoh nyata adalah seperti yang pernah terjadi di Jakarta. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Suprato pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta, bentuk T.J.S.L. yang dijalankan hanyalah dalam pengertian yang sederhana. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut meliputi: pertama: kegiatan kekeluargaan sebanyak 116 perusahaan; kedua: sumbangan kepada lembaga agama sebanyak 50 perusahaan; ketiga: sumbangan kepada yayasan sosial sebanyak 39 perusahaan; keempat: pengembangan komunitas sebanyak 4 perusahaan.<sup>18</sup>

Tidak menutup kemungkinan pelaksanaan T.J.S.L. yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di kota lain juga mengalami hal yang serupa, bahkan ada perusahaan yang tidak sepenuhnya memperhatikan kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitar perusahaan. Seperti pelaksanaan T.J.S.L. pada PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros. Sebagaimana yang di lansir oleh **RAKYATKU.COM, MAROS** pada hari senin, 18 September 2017, disebutkan bahwa Sekretaris Pimpinan Cabang

---

<sup>17</sup> Eni Suastuti, *Rechtidde Jurnal Hukum: Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR*, (Vol. 9, No. 2, Desember 2014), h. 207.

<sup>18</sup> Sukarni, *Jurnal Legislasi Indonesia: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal di Indonesia*, (Volume 5 Nomor 2-Juni 2008).

Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Maros, Abrar Rahman mengaku kecewa dengan rendahnya perhatian PT Semen Bosowa Maros terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan kepemudaan. Selama tahun 2017, pabrik semen ini tidak banyak berpartisipasi terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan. Padahal pabrik Semen Bosowa sudah punya dua line atau dua pabrik semen. Ini berarti produksinya bisa dua kali lebih banyak. Jika begitu tidak ada alasan bagi pihak perusahaan tidak berkontribusi besar terhadap masyarakat Maros. “Harusnya, perhatian dan bantuan kepada kegiatan sosial, terutama kegiatan kepemudaan semakin baik” tegas tokoh pemuda Maros itu.

Abrar menambahkan, pihak manajemen PT Semen Bosowa Maros selalu berdalih dengan alasan keuangan perusahaan yang tidak stabil, tidak ada uang. Padahal, bagaimanapun selama perusahaan masih beroperasi, Perusahaan tersebut punya kewajiban dan tanggung jawab sosial melalui program CSR yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Menurutnya atas dasar regulasi ini, PT Semen Bosowa Maros mesti menyampaikan secara berkala kepada masyarakat terkait program sosial kemasyarakatan, jumlah dana CSR tiap tahun dan informasi terkait prosedur, agar masyarakat luas bisa dengan mudah mengakses dana atau program dari CSR perusahaan. “Sudah seharusnya pula PT Semen Bosowa Maros membantu air bersih gratis untuk masyarakat maros utamanya masyarakat ring satu dan desa-desa pesisir Kecamatan Bontoa yang dilanda krisis air bersih. Jangan selalu berdalih

tidak ada uang padahal tiap hari beroperasi. Kalau tidak punya uang stop pertambangan, berhenti mengeksploitasi alam Maros,” tutupnya.<sup>19</sup>

Berdasar uraian di atas penyusun bermaksud untuk meneliti salah satu jenis perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, yaitu PT Semen Bosowa Maros terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (T.J.S.L.). Dipilihnya perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas karena jenis perusahaan ini sudah secara tegas diwajibkan untuk melaksanakan T.J.S.L. sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Oleh karena itu penyusun mengangkat judul :**“Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros”**.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (T.J.S.L.) yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros?
2. Sejauhmanakah perwujudan pelaksanaan T.J.S.L. yang dilakukan PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros?

---

<sup>19</sup> Rakyatku.Com: Maros, 18 September 2017 23:41, diunduh sabtu, 19 Mei 2018 pukul 21:49. (news.rakyatku.com)



### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Skripsi ini berjudul **“Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros”**. Adapun fokus penelitian ini adalah bentuk-bentuk penerapan berupa T.J.S.L. yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros.

Adapun deskripsi fokus yaitu :

Secara umum praktik program T.J.S.L. telah dilaksanakan sejak berdirinya perusahaan meskipun dengan nama yang berbeda. PT Semen Bosowa Maros telah mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap program ini terbukti dengan adanya divisi khusus yang membidani pelaksanaan program T.J.S.L. yaitu divisi *Community Development* di bawah naungan Divisi Administrasi. Berdasarkan data dokumen laporan CSR tahun 2015 oleh Divisi Communiti Development PT Semen Bosowa Maros diketahui bahwa aktivitas pertanggungjawaban perusahaan dibagi ke dalam dua jenis bentuk bantuan yaitu: bantuan dana dan bantuan semen kepada empat daerah penerima. Selanjutnya dalam pelaksanaan aktivitas bantuan dananya, perusahaan membagi menjadi tiga kategori yaitu: Sosial dan Ekonomi, Pendidikan, serta Keagamaan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Anugerah febrianty, *Skripsi: Audit Sosial Atas Realisasi CSR Pada PT Semen Bosowa Maros* (Universitas Negeri Makassar: Fakultas Ekonomi, 2016), h. 56.

#### ***D. Kajian Pustaka***

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa buku yang dimana didalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli:

1. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil dalam bukunya “Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007”. Buku ini memuat: Arti Perseroan Terbatas, Macam-macam Perseroan Terbatas, Organ-organ Perseroan Terbatas, dll.
2. Ahmad Yani dan Gunawan widjaja dalam bukunya “Perseroan Terbatas”. Buku ini membahas mengenai kewajiban penyelenggaraan dan penyimpanan dokumen perusahaan, kewajiban pendaftaran perusahaan, serta berbagai macam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, serta dibahas pula aspek hukum kepemilikan bayangan dalam suatu perseroan dan pengurus perseroan terbatas oleh direktur bayangan.
3. Agus Budiarto dalam bukunya “Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas”. Buku ini memaparkan secara deskriptif tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas (PT) secara pribadi dan tanggung jawab PT itu sendiri.
4. Hendrik Budi Untung dalam bukunya “Corporate Social Responsibility”. Seorang pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang menganalisis dengan cerdas tentang CRS meliputi arti, manfaat, kategori perusahaan menurut CSR, dan faktor yang mempengaruhi implementasi CSR.

Akan tetapi, skripsi yang penyusun buat ini berbeda dari ke-4 (empat) peneliti sebelumnya, yakni dalam skripsi ini membahas tentang kewajiban Perseroan Terbatas terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta perwujudan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros.

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan pustaka hukum yang berkaitan dengan hukum perusahaan terutama yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi tentang bentuk penerapan TJSL yang dilakukan PT Semen Bosowa Maros. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran untuk dunia usaha dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TJSL serta dapat dijadikan sebagai masukan dan menjadi pertimbangan kepada pelaku usaha di dalam melaksanakan TJSL.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas*

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas**

Secara khusus, badan usaha perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UU No. 40 Tahun 2007, berlaku UUPT No. 1 Tahun 1995 yang diberlakukan sejak 7 maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) s.d 15 Agustus 2007, UUPT Tahun 1995 tersebut sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD pasal 36 sampai dengan pasal 56, dan segala perubahannya.<sup>21</sup>

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze vennootschap, disingkat NV*). Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat dengan PT tidak dapat ditelusuri.<sup>22</sup> Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Sebelumnya diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>21</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: penerbit Prenadamedia Group, 2016), h. 15.

<sup>22</sup>Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h.1.

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Istilah Perseroan Terbatas terdiri atas dua kata, yakni perseroan dan terbatas.

Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>23</sup>

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan pasal 1 angka 1 UUPt, yakni:

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Penunjukan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari pasal 3 UUPt yang menentukan :

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya”.

Istilah *Naamloze Vennootschap* (NV) yang dulunya digunakan pasal 36 KUHD secara literal bermakna persekutuan tanpa nama (*anonymous partnership*). Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan pasal 16 KUHD yang menentukan

---

<sup>23</sup>Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1984), h. 87.

bahwa firma adalah persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama.<sup>24</sup>

Bila kita melihat kembali pada peraturan lama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), definisi mengenai perseroan terbatas ini tidak dijumpai dalam pasal-pasal-pasal. Namun demikian, menurut Agus Budiarto dari pasal-pasal : 36, 40, 42 dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu PT mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
- c. Adanya pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya

---

<sup>24</sup>Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h.1.

Demikian pula setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, juga tidak ditemukan secara tegas di dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai klasifikasi yang bagaimana sehingga suatu badan usaha itu dapat dikategorikan sebagai perseroan terbatas.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur :

1. Berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutuan modal.
2. Didirikan atas dasar perjanjian.
3. Melakukan kegiatan usaha.
4. Modalnya terbagi saham-saham.
5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.

<sup>25</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas* (Cetakan Pertama: Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), h. 24.

Hanya menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah merupakan badan hukum. Untuk mendapatkan status badan hukum ini pun masih harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman.

## **2. PT Merupakan Badan Hukum**

Seperti telah dijelaskan di muka, untuk dapat disebut sebagai perseroan terbatas suatu badan usaha harus mempunyai ciri-ciri antara lain harus mempunyai kekayaan sendiri, ada pemegang saham sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang diambilnya (modal yang disetor) dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas. Ini berarti bahwa badan usaha yang disebut perseroan terbatas harus menjadikan dirinya sebagai badan hukum, sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri yang mampu mendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya dengan orang yang mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, dan para pengurusnya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas* (Cetakan Pertama; Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 25.



Menurut Soemarti, walaupun dalam peraturan lama tidak secara tegas menyatakan perseroan terbatas adalah badan hukum, namun dari pasal 40 (2) KUHD yang mengatakan bahwa :

“Persero-persero atau pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu”.

Dan dari bunyi Pasal 45 ayat (1) KUHD yang mengatakan :

“Pengurus tidak bertanggung jawab lebih dari pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan kepadanya; mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak ketiga berdasarkan perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perseroan”.

Dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum.<sup>27</sup>

Sementara itu peraturan di luar KUHD justru ada yang menunjuk secara tegas bahwa perseroan terbatas adalah merupakan badan hukum. Hal ini dapat dilihat pada pasal 2 ayat (7) dan pasal 102 Peraturan Kepailitan. Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa perseroan terbatas dimasukkan dalam kelompok persekutuan yang berbadan huku dan menjadi subyek hukum dalam lalu lintas hukum disamping orang.

UUPT sekarang menyatakan dengan tegas di dalam pasal 1 ayat (1) bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. Dengan demikian kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum tidak perlu lagi disimpulkan sebagaimana halnya dalam KUHD. Disamping itu, pemakaian istilah perseroan terbatas disingkat PT yang selama ini hanya mendasarkan pada kebiasaan yang telah menjadi baku di

---

<sup>27</sup>Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas* (Cetakan Pertama; Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 26.

masyarakat, telah pula resmi mendapat landasan hukumnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 ayat (2) yang menyatakan “Nama perseroan harus didahului dengan perkataan perseroan terbatas atau disingkat PT”.

### **3. Pendirian Perseroan Terbatas**

Suatu perseroan terbatas berdiri atau ada semata-mata karena perjanjian oleh dua orang atau lebih dengan akta resmi atau akta notaris. Demikian ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa :

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia”.

Ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT ini menegaskan bahwa akta notaris merupakan syarat mutlak untuk adanya suatu perseroan terbatas. Tanpa adanya akta otentik ini akan meniadakan eksistensi perseroan terbatas sebab akta pendirian inilah nantinya yang harus di sahkan oleh Menteri Kehakiman.

Menurut H.M.N. Purwoautjipto, bilamana seseorang akan mendirikan sebuah perseroan terbatas, maka para pendiri, yang biasanya terdiri dari dua orang atau lebih, melakukan perbuatan hukum sebagai berikut :

- a. Pertama, para pendiri datang di kantor notaris untuk minta dibuatkan akta pendirian PT. Yang disebut akta pendirian itu termasuk di dalamnya anggaran dasar dari PT yang bersangkutan. Anggaran dasar ini dibuat sendiri oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah antar mereka. Kalau para pendiri merasa tidak

sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan.

- b. Kedua, setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman. Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Kehakiman, tetapi harus ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan.
- c. Ketiga, para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman beserta surat keputusan pengesahan ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahi domosili PT tersebut untuk didaftarkan.
- d. Keempat, para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Departemen Kehakiman, serta surat dari Panitera Pengadilan Negeri tentang telah didaftarkanya akta pendirian PT tersebut ke Kantor Percetakan Negara, yang menerbitkan tambahan berita negara R.I. Sesudah akta pendirian PT tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I., yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum.<sup>28</sup>

Hal-hal penting yang perlu diketahui bagi pembentukan perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jilid 2; Jakarta: Djambatan, 1984), h. 95.

- a. Menurut Polak,<sup>29</sup> jumlah pendiri perseroan terbatas di Jerman ditetapkan dalam undang-undang paling sedikit 5 orang, di Perancis dan Belgia 7 orang, dan di Swiss 3 orang. Sedangkan di Nederland dan di Indonesia paling sedikit 2 orang (pasal 1618 KUHPer). Menegenai jumlah pendiri, Prof Soekardono<sup>30</sup> berpendapat bahwa jumlah itu sebaiknya ganjil, untuk memudahkan pengambilan keputusan dalam musyawarah atau rapat-rapat.
- b. Akta pendirian harus autentik (dalam hal ini notariil) -- ( pasal 38 ayat 1 KUHD ). Tetapi dalam pasal ini tidak dijelaskan apakah di dalamnya termasuk anggaran dasar. Anggaran dasar ini penting sekali adanya dalam kehidupan sebuah PT, dan itu harus disertakan dalam akta pendirian.
- c. Akta pendirian yang notariil itu merupakan satu-satunya alat pembuktian yang sempurna bagi adanya Perseroan Terbatas (Pasal 38 KUHD).
- d. Pengesahan dari Menteri Kehakiman. Pasal 36 ayat (2) KUHD memerintahkan agar akta pendirian beserta anggaran dasarnya dikirimkan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahan.

Bila pendirian PT itu ditolak, maka alasan-alasannya harus diberitahukan secara tertulis kepada pemohon, kecuali bila pemberitahuan itu dipandang kurang layak, misalnya bila sebuah PT didirikan berkedok nasional, tetapi nyatanya para

---

<sup>29</sup>Polak, *Handboek Voor Het Ned – en Faillissementsrecht* (Deel I; Druk 5; 1935, bl. 337).

<sup>30</sup>Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia* (Jilid I; Jakarta: Djambatan, 1964), h. 120.

pendiri itu adalah pelayan-pelayan modal asing yang mengandung maksud untuk merusak perekonomian Indonesia (Pasal 37 ayat 2 KUHD).<sup>31</sup>

Mengenai pendaftaran dan pengumuman akta pendirian PT diatur dalam pasal 38 ayat (2) dan (3) KUHD. Ayat (3) tersebut mengatur secara khusus tentang pendaftaran dan pengumuman terhadap perubahan-perubahan akta pendirian dan perpanjangan waktu perseroan.

#### **4. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas**

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam UUPT dan UUPM, maka PT dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu :

- a. PT Terbuka, yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang saham memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 1 ayat 6 UUPT). Menurut UUPM yang dimaksud dengan PT terbuka atau dalam UUPM disebut perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3 Miliar atau suatu jumlah pemegang saham atau modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
- b. PT Tertutup, adalah perseroan yang tidak termasuk dalam kategori PT Terbuka.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Purwosutjipto, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jilid 2; Jakarta: Djambatan), h. 96.

<sup>32</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 55.

## 5. Organ Perseroan Terbatas

Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) UUPT yang menjelaskan :

“Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris”

Dengan demikian dapat dilihat bahwa perseroan terbatas mempunyai organ yang terdiri atas :

### a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan sebagaimana ditemukan dalam pasal 1 butir 3 UUPT yang mengatakan:

“Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris”.

Akan tetapi, bila kita melihat pada bunyi kalimat “*memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris*”, maka apa yang dimaksud di dalam pasal 1 butir 3 UUPT tersebut di atas sebenarnya kekuasaan RUPS adalah tidak mutlak. Artinya, kekuasaan tertinggi yang diberikan oleh undang-undang kepada RUPS tidak berarti bahwa RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepada direksi dan komisaris.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab pendiri Perseroan terbatas* (Cetakan Pertama; Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 57.

Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa direksi atau komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS. Tugas, kewajiban, wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam undang-undang perseroan terbatas tahun 1995.

Menurut pasal 65 UUPT, RUPS dapat diselenggarakan dengan 2 (dua) macam RUPS, yaitu sebagai berikut:

1. RUPS Tahunan, yang diselenggarakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
2. RUPS Lainnya, yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Penyelenggaraan RUPS secara tahunan dan secara sewaktu waktu pada prinsipnya yang berwenang menyelenggarakan adalah direksi, kecuali direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan, maka pemanggilan dilakukan oleh komisaris.

b. Direksi

Direksi atau disebut juga sebagai pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di

dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian ruang lingkup tugas direksi ialah mengurus perseroan.<sup>34</sup>

Menurut teori organisme dari Otto von Gierke sebagaimana yang dikutip oleh Suyling<sup>35</sup>, Pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum.

Seperti halnya manusia yang mempunyai organ-organ tubuh misalnya, kaki, tangan, dan lain sebagainya itu gerakannya diperintah oleh badan hukum itu sendiri, sehingga pengurus adalah merupakan personifikasi dari badan hukum itu.

Di dalam penjelasan resmi dari pasal 79 ayat 1 UUPT dikatakan bahwa tugas direksi dalam mengurus perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Apa yang dimaksud dengan pengurusan sehari-hari lebih lanjut tidak ada penjelasan resmi. Oleh karena itu, harus dilihat dalam anggaran dasar tentang apa yang termasuk pengurusan sehari-hari, walaupun tidak mungkin disebut secara detail dalam anggaran dasar tersebut. Mengurus perseroan semata-mata adalah tugas direksi yang tidak dapat dicampuri langsung oleh organ lain.

Pasal 79 ayat 1 dan pasal 80 ayat 1 UUPT tidak menjelaskan sampai dimana kewenangan direksi dalam menjelaskan tugasnya. Pasal-pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa PT diurus oleh pengurus yang diangkat oleh para pemegang saham, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai luas, isi maupun ruang lingkup

---

<sup>34</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab pendiri Perseroan terbatas* (Cetakan Pertama; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h. 58.

<sup>35</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab pendiri Perseroan terbatas* (Cetakan Pertama; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h. 61.



pengurusan itu. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan RUPS tersebut dilakukan oleh komisaris atas nama RUPS. Jadi, untuk mengetahui rincian tugas direksi harus dilihat dalam anggaran dasar PT tersebut.

Meskipun dalam praktek terdapat pemegang saham yang sekaligus menjadi direksi, namun fungsi pemegang saham dan fungsi direksi dipisah secara tegas oleh undang-undang.

Dengan dipisahkannya kedua fungsi itu, di harapkan kontinuitas jalannya perseroan menjadi terjamin. Meskipun pemegang saham setiap waktu dapat berubah, akibat sahamnya dijual kepada pihak lain atau karena meninggal dunia dan sebagainya, akan tetapi dengan pemisahan itu direksi pada dasarnya tetap menjalankan perseroan sebagaimana mestinya. Direksi ataupun pemegang saham masing-masing mempunyai kewenangan sendiri-sendiri yang dapat mereka lakukan secara mandiri dan untuk itu mereka juga mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri pula. Sekalipun demikian kemandirian direksi tidak menjadikan kekuasaan direksi dijalankan tanpa batas. Direksi tidak boleh melakukan perbuatan sekehendaknya sendiri walaupun itu dengan alasan untuk kepentingan perseroan.

c. Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.<sup>36</sup>

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, istilah komisaris meliputi dua pengertian berikut:

- a. Pengertian pertama adalah sebagai organ perseroan yang lazimnya dikenal dengan nama dewan komisaris dan anggota dewan komisaris. Undang-undang perseroan terbatas memberikan hak sepenuhnya kepada pendiri ataupun pemegang saham perseroan untuk menentukan sendiri wewenang dan kewajiban komisaris dalam perseroan.
- b. Pengertian kedua adalah sebagai pelaksana tugas komisaris. Tugas komisaris menurut undang-undang perseroan terbatas yaitu mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi perseroan.

Dalam undang-undang perseroan terbatas dikatakan bahwa komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan.

---

<sup>36</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 99.

Segala kesalahan dan kelalaian komisaris dalam menjalankan tugasnya akan melahirkan pertanggungjawaban pribadi dari komisaris bersangkutan kepada perseroan dan pemegang saham perseroan.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selain mengatur ketentuan mengenai dewan komisaris juga menambahkan adanya komisaris independen dalam struktur organ perseroan. Komisaris independen ini berasal dari luar kelompok direksi dan komisaris utama. Ini berguna untuk menyeimbangkan peran dewan komisaris dan demi iklim manajemen perseroan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha, dan memberi nasihat kepada direksi. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi itu.

Dewan komisaris mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 116 UU No. 40 Tahun 2007, yaitu:

- a. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. Melaporkan kepada perseroannya mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain;

- c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

## ***B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (T.J.S.L.)***

### **1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (T.J.S.L.)**

CSR adalah istilah yang seringkali dipakai berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (T.J.S.L.) oleh perusahaan.

Dalam ensiklopedia bebas, Wikipedia, CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.<sup>37</sup>

T.J.S.L. juga disebutkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, di dalam asal 1 butir 3 yang berisi :

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

---

<sup>37</sup> Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Maret 2008), h. 1.

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa T.J.S.L. atau yang sering disebut dengan istilah *CSR* adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap suatu persala tertentu di masyarakat aau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik sehingga terdapat suatu hubungan yang saling menguntungkan. Kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya : pembangunan infrastruktur, pelatihan tenaga kera, pemberian beasiswa dan lain sebagainya.

## **2. T.J.S.L. Merupakan Tren Baru**

Gambaran mengenai T.J.S.L. dikemukakan pada alinea kedelapan Penjelasan Umum, yang dapat dideskripsi sebagai berikut:

- Tujuan T.J.S.L. untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya;
- T.J.S.L. bermaksud untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
- Sehubungan dengan itu perlu ditentukan, bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan T.J.S.L.;

- Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, kegiatan T.J.S.L. harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- Selanjutnya, kegiatan T.J.S.L. dimuat dalam LT Perseroan.<sup>38</sup>

Kita yakin, T.J.S.L. yang diatur dalam UUPT 2007, diilhami oleh pandangan yang berkembang belakangan ini yang mengajarkan perseroan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat, harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat.

Pandangan tersebut, telah melahirkan konsep tanggung jawab sosial Perseroan (CSR). Landasan pandangan CSR bersumber dari nilai moral, bahwa Perseroan hidup dan berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan dan kelancaran kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung dan terkait kepada lingkungan dan masyarakat yang bersangkutan. Perseroan harus mempunyai kepedulian terhadap masyarakat di mana dia hidup dan berada. Perseroan tidak terlepas dari tanggung jawab memenuhi kepentingan publik.<sup>39</sup>

Menurut Mc Oliver – EA Marshal,<sup>40</sup> CSR bertujuan antara lain:

- Memberikan sebagian keuntungan Perseroan kepada masyarakat dan lingkungan,

---

<sup>38</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 297.

<sup>39</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 298.

<sup>40</sup> *Company Law* (Handbook Series, 1991), h. 321.

- Melibatkan sumber dan personal Perseroan mengadakan pelatihan khusus (*special training*) dan kegiatan nonlaba (*non profit*) kepada masyarakat sekitarnya,
- Ikut bertanggung jawab melindungi lingkungan di sekitarnya.

### **3. T.J.S.L. Hanya Terbatas atas Perseroan yang Menjalankan Kegiatan Usaha di Bidang Sumber Daya Alam**

#### **a. Perseroan yang Wajib Melaksanakan T.J.S.L.**

Ketentuan yang mengatur T.J.S.L. hanya terdapat pada Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga kewajiban T.J.S.L. tidak dipikulkan terhadap semua perseroan, akan tetapi hanya terbatas terhadap perseroan terbatas yang;

#### **1) Menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam**

Perihal yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam (Menurut penjelasan Pasal 74 ayat 1) adalah perseroan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

#### **2) Menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam**

Menurut alinea ketiga penjelasan Pasal 74 ayat (1) yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam, adalah perseroan yang:

- Tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam,
- Tetapi kegiatan usahanya “berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam”

Hanya sebatas Perseroan tersebut yang diwajibkan Pasal 74 melaksanakan T.J.S.L. Perseroan yang tidak menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam atau yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam, tidak diwajibkan melaksanakan T.J.S.L.

b. Pelaksanaan Kewajiban T.J.S.L., Dianggarkan dan Diperhitungkan Sebagai Biaya Perseroan

Supaya pelaksanaan kewajiban T.J.S.L. tidak hanya hiasan, Pasal 74 ayat (2) memerintahkan;

- Perseroan harus menganggarkan dan memperhitungkan T.J.S.L. sebagai biaya Perseroan.

Dengan demikian, pada saat Direksi menyusun RKT berdasar Pasal 63 ayat (1), di dalamnya harus memuat anggaran T.J.S.L. untuk tahun buku yang akan datang.

- Pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

c. Perseroan yang tidak melaksanakan T.J.S.L. Dikenai Sanksi

Menurut Pasal 74 ayat (3), Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban T.J.S.L., padahal dia memenuhi kriteria sebagai Perseroan yang melakukan kegiatan di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.



#### 4. CSR Sebagai Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Banyak literature menyebutkan bahwa keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan keberlanjutan pada dimensi sosial dan lingkungan, selain juga keberlanjutan ekonomi.

Mengapa keberlanjutan sebuah perusahaan ditentukan oleh aspek sosial dan lingkungan, bukan semata-mata oleh aspek ekonomi? Bagaimanapun, aspek sosial dan lingkungan adalah parameter untuk mengetahui apakah ada dampak positif atau negatif dari kehadiran perusahaan terhadap komunitas lokal.

Dalam aspek ekonomi, perusahaan jelas memiliki peran yang sangat penting. Perusahaan mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan berbagai insiatifnya, memenuhi kebutuhan tersebut. Aktivitas memenuhi kebutuhan ini membuat roda perekonomian berputar, menghasilkan gaji dan upah bagi pekerja dan pajak bagi pemerintah. Dengan pajak, pemerintah berkesempatan membentuk kondisi agar perekonomian daerah berkembang lebih lanjut. Namun, upaya perusahaan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi juga menimbulkan dampak negatif.

Kenyataan peran perusahaan dalam pembangunan ini diungkapkan Hernan dalam bukunya berjudul *"This borrowed earth"*, bahwa sebagian besar bencana lingkungan paling buruk disebabkan oleh perusahaan. Senada dengan Hernan, Kiernan juga mengungkapkan bahwa 75 persen masalah sosial dan lingkungan disebabkan oleh perusahaan. Peran perusahaan terhadap kemerosotan kualitas lingkungan hidup dan sosial masyarakat telah membawa dampak negatif misalnya polusi, eksploitasi

tenaga kerja dan sumber energi, kerusakan lingkungan, penggunaan energi yang tidak bertanggung jawab lainnya.<sup>41</sup>

Dengan demikian, kesadaran untuk melaksanakan CSR perlu mendapat perhatian yang serius karena merupakan wujud kesadaran perusahaan sebagai upaya meningkatkan hubungannya dengan masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karena itu, keduanya bukanlah dua entitas yang harus saling menegaskan atau dua entitas yang saling mengeksploitasi. Bagaimanapun, keputusan perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas.

Lebih jauh, bila CSR mampu dijalankan secara efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam. Sedangkan bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut "*corporate misconduct*" atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi.

Dengan demikian, ide tanggung jawab sosial adalah bagaimana instansi memberikan perhatian kepada lingkungannya, terhadap dampak yang ditimbulkan

---

<sup>41</sup> Prima Mulyasari Agustina, *Cyber CSR* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 15.

dari kegiatan operasional instansi. Jadi, CSR adalah nilai yang melandasi aktivitas perusahaan. CSR merupakan model kebijakan perusahaan yang terpadu dalam keikutsertaan dalam upaya pembentukan bisnis yang berdasarkan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan seluruh *stakeholder* eksternal dengan kepentingan *shareholder* (pemegang saham). Lebih jauh, dalam CSR tercakup di dalamnya empat landasan pokok yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu; landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi, dalam isu lingkungan hidup, dalam isu sosial serta dalam isu kesejahteraan.

### ***C. Asas Kepatutan Dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perseroan***

#### **1. Konsep Kepatutan Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Secara etimologi, kepatutan diartikan sebagai kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, segala yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas yang berlaku dalam masyarakat.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Mariam Darus, “kepatutan adalah yang dapat dirasakan sebagai sopan, patut dan adil. Jadi rumus kewajaran dan kepatutan meliputi semua yang dapat ditangkap baik dengan intelek maupun perasaan”.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Kamus Besar, *Kepatutan*. <http://www.kamusbesar.com>. Diakses pada tanggal 8 juni 2018 pukul 13.57.

<sup>43</sup> Hukum Online, 2014. *Profesor FH USU Bedah Definisi Asas “Itikad Baik”*. <http://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 8 juni 2018 Pukul 14.04 wita.

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP T.J.S.L., yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan. Kepatutan merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum perjanjian. Asas kepatutan itu mengikat tidak hanya karena undang undang menunjuknya, melainkan karena kepatutan itu menentukan isi dari janji itu yang mengikat.<sup>44</sup>

Asas kepatutan termuat dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

Dalam ketentuan UUPT, T.J.S.L merupakan kewajiban perseroan sebagai *legal entity* yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, maka dalam hal ini harus ada itikad baik dari perusahaan. Itikad baik dalam arti subjektif

---

<sup>44</sup> Sulaeman, *Badamai Law Jurnal: Asas Kepatutan Dalam T.J.S.L.* (Vol. 1: April 2016), h. 63.

merupakan suatu sikap batin atau suatu keadaan jiwa, sehingga itikad baik dimaknai sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang menguasai atau memegang barang pada waktu ia mulai menguasai barang tersebut. Sedangkan pada arti objektif, itikad baik diartikan sebagai kepatutan.<sup>45</sup>

Syarat kepatutan berakar pada suatu sifat peraturan hukum pada umumnya, yaitu usaha mengadakan imbang dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakikatnya tidak diperbolehkan suatu kepentingan seorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat, bahwa kepentingan orang lain sama sekali didesak atau diabaikan. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa masyarakat harus merupakan suatu neraca yang lurus dalam keadaan seimbang. Kalau neraca ini mendorong yang ke satu pihak, maka tidak boleh ada keganjilan dalam masyarakat, yang pada suatu waktu tentu kelihatan akibatnya yang jelek bagi keselamatan dan bahagia masyarakat sendiri.<sup>46</sup>

Dalam hukum perjanjian di Indonesia (KUH Perdata) untuk menentukan apakah substansi klausula dalam perjanjian baku merupakan klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya terdapat pengaturannya dalam pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Sedangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa

---

<sup>45</sup> Antique, 2011. *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan (T.J.S.L.) dan Hukum Lingkungan*. <http://antiquem.blogspot.co.id>. Diakses pada tanggal 18 Juni 2018 pukul 14.10 wita.

<sup>46</sup> Wirjono Pradjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 187.

suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga oleh segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan ketertiban umum.

## **2. Konsep Kepatutan dalam UUPT jo. PP T.J.S.L.**

Ketegasan tentang T.J.S.L. ditentukan dalam UUPT yang telah menempatkan T.J.S.L. sebagai tindakan sukarela perusahaan atau sebuah kewajiban hukum yang imperative (wajib dilaksanakan), dengan mengatur :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Maksud kewajiban

perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan adalah bahwa T.J.S.L. harus ditetapkan dalam anggaran perusahaan. Disinilah maksudnya penerapan T.J.S.L. ada unsur pemaksaan, yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi hukum (Pasal 74 ayat (3) UUPT). Apabila T.J.S.L. ditetapkan di dalam anggaran perusahaan maka tentu saja dapat memberatkan perusahaan, apalagi perusahaan yang sedang tahap berkembang. Oleh karena itu, ada frase “kepatutan dan kewajiban” sebagai *exit clause* bagi Pemerintah untuk menentukan pelaksanaan T.J.S.L. Maksudnya adalah sebagai alasan Pemerintah untuk menerapkan T.J.S.L. kepada perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang tadi, tentu saja penerapan T.J.S.L. diutamakan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan oleh perusahaan yang tidak bergerak dalam bidang Sumber daya alam.

Di dalam Pasal 74 ayat (2) UUPT tidak disebutkan secara tegas berapa persen untuk melaksanakan T.J.S.L. dari laba perusahaan. Dengan demikian peraturan ini tidak memiliki kepastian hukum untuk dilaksanakan. Interpretasi yang dilakukan pelaku usaha dari pengaturan Pasal 74 UUPT yang mengatur mengenai T.J.S.L. dalam hal biaya pelaksanaan T.J.S.L. diambil dari laba bersih perusahaan setiap tahunnya. Hal ini juga belum diatur dalam ketentuan peraturan perundangan. Dengan demikian setiap pelaku usaha kebingungan untuk menerapkan T.J.S.L. Apalagi kenyataannya di lapangan, orientasi pelaku usaha untuk membangun sebuah perusahaan adalah orientasi laba ataupun keuntungan. Apabila beban biaya T.J.S.L. diambil dari laba bersih perusahaan setiap tahun maka akan mengurangi keuntungan

berjalan. Belum lagi harus membayar pajak penghasilan yang sangat membebankan pelaku usaha.<sup>47</sup>

Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa biaya pelaksanaan T.J.S.L. diperhitungkan sebagai salah satu komponen biaya perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan T.J.S.L. ini seharusnya pada akhir tahun buku diperhitungkan sebagai salah satu pengeluaran perusahaan. Agar dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak, maka rencana T.J.S.L. yang akan dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan wajib untuk dimuat atau dimasukkan ke dalam rencana kerja tahunan.

Kemudian adanya ketentuan dana yang dianggarkan dan diperhitungkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Artinya, jumlah biaya dan beberapa proporsinya untuk T.J.S.L. akan ditentukan oleh pemerintah, yang kita tidak tahu persis bagaimana caranya itu akan dihitung guna menghindari logika sesat dimana T.J.S.L. adalah aktivitas setelah pajak. Di sinilah bahaya terbesar muncul yakni T.J.S.L. direduksi menjadi pengaturan dana saja. Beberapa pengamat sudah menyatakan kemungkinan hal ini akan menjadi ladang korupsi baru, namun yang pasti adalah reduksi itu akan mendangkalkan makna substansi dari T.J.S.L. sebagai

---

<sup>47</sup> Sulaeman, *Badamai Law Jurnal: Asas Kepatutan Dalam T.J.S.L.* (Vol. 1: April 2016), h. 6.



alat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi sekedar sumbangan dana perusahaan.<sup>48</sup>

Kepatutan sebagai dasar pelaksanaan T.J.S.L. semestinya tidak hanya didasarkan pada kondisi internal perusahaan, tetapi juga harus dikaitkan dengan situasi dan kondisi eksternal perusahaan. Oleh karena itu, pengaturan pelaksanaan T.J.S.L. lebih lanjut harus bisa menempatkan secara adil, tidak hanya kewajiban perusahaan saja tetapi juga hak-hak perusahaan dan tanggung jawab pihak eksternal perusahaan yang terkait langsung dengan T.J.S.L. yakni masyarakat.



---

<sup>48</sup> Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 131.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Normatif-Empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau penerapan peraturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilaksanakan/diterapkan oleh PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros.

Adapun lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di PT Semen Bosowa Maros. Alasannya ialah karena PT Semen Bosowa Maros masih kurang Perhatian terhadap kegiatan kemasyarakatan kepemudaan di sekitar lingkungan, kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan jalan/jembatan/irigasi, tidak adanya penyediaan air bersih, minimnya penangkaran debu yang mengganggu masyarakat, sehingga bisa dikatakan PT Semen Bosowa Maros tidak sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

## ***B. Pendekatan Penelitian***

### **1. Pendekatan Yuridis**

Pendekatan yuridis yaitu suatu cara atau metode yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.

### **2. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul dalam masyarakat.

## ***C. Sumber Data***

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penyusun dari dua jenis data yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui atau dengan cara melihat dan membaca buku, bahan-bahan laporan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan Terbatas.

## ***D. Metode Pengumpulan Data***

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, maka diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga penyusun memiliki metode yang jelas mengenai mekanisme perolehan data atau jawaban yang diperlukan. Dengan demikian, untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan

penelitian, maka penyusun menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field reserch*) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), merupakan penyelidikan melalui buku-buku kepustakaan dan berbagai sumber bacaan dengan mengkaji peraturan-peraturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT Semen Bosowa Maros.
2. Penelitian lapangan (*field reserch*), merupakan penelitian yang mengharuskan penyusun untuk turun langsung ke lapangan atau objek penelitian guna memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros.

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan dua metode yaitu; metode wawancara/interview, dan dokumenter. Dengan menggunakan dua metode tersebut, diharapkan penyusun dapat memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk memberikan penjelasan terhadap kedua metode pengumpulan data tersebut, berikut ini akan dibahas secara singkat sebagai berikut:

a. Metode wawancara/interview

Metode interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk mengumpul data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (interview) antara peneliti dengan beberapa narasumber (informan) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Interview ini ditujukan kepada para pejabat yang berwenang dalam

hal yang berkaitan dengan judul penelitian serta masyarakat setempat. Dalam hal ini penyusun mewawancarai Nur Alang, 28 tahun selaku ketua Comdev and Environment dan Arul Nurdin selaku sekretaris Comdev serta salah seorang warga setempat yaitu Muh. Amin, 32 tahun.

b. Metode dokumenter

Metode dokumenter adalah suatu metode penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber informasinya berupa dokumen bahan-bahan tertulis atau tercatat. Dengan demikian, peneliti langsung mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Sedangkan pengertian dokumen itu sendiri adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran suatu peristiwa dan atau ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai suatu peristiwa. Penyusun menggunakan metode dokumenter karena:

1. Keterbatasan kemampuan dalam meneliti maka dokumen mempunyai peranan yang sangat besar.
2. Dapat melengkapi data yang diperoleh melalui data lainnya.

Pada proses penelitian, kami memperoleh dokumen dari Arul selaku penanggung jawab Comdev Ring 1, berupa: profil perusahaan, kebijakan perusahaan terkait T.J.S.L., tata kelola kegiatan T.J.S.L., program-program unggulan comdev PT SBM dan juga dokumen dari Asrul Nurdin selaku sekretaris comdev, berupa: Jobdes

Environment tahun 2017, program kerja T.J.S.L. tahun 2017, rekap dana T.J.S.L. tahun 2017, rekap semen T.J.S.L. tahun 2017.

#### ***E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut :

1. Reduksi data. Dimana teknik pengolahan data ini merupakan proses mengubah data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
3. Pengambilan keputusan ialah mencari kesimpulan atas data yang direduksi dan disajikan.

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi kualitatif yaitu teknik pengolahan data yang dilakukan dengan mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Gambaran Umum Objek Penelitian*

##### **1. Sejarah Singkat PT Semen Bosowa Maros**

Sejalan dengan kebutuhan pembangunan, dunia usaha, dan perkembangan teknologi, pada awal 1995 PT Semen Bosowa Maros memulai pelaksanaan proyek semen dengan tujuan mempercepat kemajuan pembangunan industri di kawasan Indonesi Timur dan nasional pada umumnya. Setelah pengujian geologi yang seksama dan mendapatkan izin dari pemerintah, maka diputuskan untuk memulai pelaksanaan proyek pembangunan semen. Momentum dari upaya pembangunan proyek semen ini dilakukan peletakan batu pertama pada tanggal 15 Juli 1995 oleh Bapak H.Z. Basri Palaguna (Gubernur KDH TK I Provinsi Sul-sel) disaksikan Menteri Keuangan RI saat itu Bapak Mari'e Muhammad.

PT Semen Bosowa Maros adalah salah satu anak perusahaan dari Bosowa Investama yang didirikan oleh H. M. Aksa Mahmud pada tanggal 6 April 1978. Latar belakang pilihan nama Bosowa berasal dari singkatan Bone, Soppeng, Wajo yang didasarkan pada latar belakang sejarah Kerajaan Bugis yang dikenal dengan nama “*Telle Poccoe*” (tiga serangkai) yaitu Kerajaan Bone, Kerajaan Soppeng, dan Kerajaan Wajo. PT Semen Bosowa Maros adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan atau produksi semen yang didirikan dengan akta nomor 29 januari 1991 dari Notaris Ny. Mestariany habie, S.H. notaris di Makassar. Anggaran dasar

perusahaan mengalami perubahan, terakhir sesuai dengan berita Acara Rapat yang diaktakan dengan nomor 3 dari Uus sumirat, S.H. pada tanggal 15 Desember 2005 tentang penigkatan modal dasar perusahaan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-06418.HT.01.04.TH.2006 Tanggal 7 Maret 2006.

PT Semen Bosowa Maros merupakan salah satu pabrik semen swasta nasional, berlokasi di Desa Baruga, Kec. Bantimurung, Kab. Maros, Provinsi Sul-Sel. Pabrik Semen Bosowa Maros memainkan peran penting dalam program pembangunan sumber daya alam dan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Investasi untuk proyek ini telah dilakukan sejak tahun 1990. Pabrik semen baru di daerah Tukamasea Desa Baruga Kecamatan Bantimurung yaitu 45 km dari Makassar dan 10 km dari kota Maros. Areal konsensi meliputi 1000 Ha untuk bahan baku, 60 Ha untuk lokasi pabrik dan 40 Ha untuk lokasi perumahan.

Sejak bulan Maret 1999, perusahaan telah mulai berproduksi, namun dengan kapasitas yang jauh di bawah yang ditargetkan sehingga manajemen menetapkan awal produksi komersil adalah tanggal 1 januari 2000. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaa telah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 650/I/PMDN/1994 tanggal 10 Oktober 1994.

Perusahaan mendapat izin pertambangan dengan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) nomor KPTS. 446/IX/94 tanggal 17 September 1994 dari Gubernur



KDH Tingkat I Sul-Sel. Lokasi areal pertambangan bahan baku semen (*limestone*) batu gamping terletak pada kaasan seluas 750 Ha di desa Tukamasea dan desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Dati II Maros.

Perusahaan telah mendapat perpanjangan izin pertambangan sesuai dengan (SIPD) Nomor 414/KPTS/540.II/X/2004 dan Nomor 415/KTPS/540.II/X/2004 tanggal 7 Oktober 2014. Dalam menjalankan usahanya perusahaan berkantor pusat di Jl. Urip Sumahardjo No.188, PO. BOX 273, Makassar 90232. Setelah penelitian geologi dan izin-izin pendukung dari pemerintah selesai, Bosowa Investama memulai pelaksanaan proyek semen pada tanggal 3 April 1995. Tanggal 23 Agustus 1998 mulai memproduksi semen, namun membeli kliner dari Semen Tonasa dan Semen Cibinong. Selanjutnya pada tanggal 8 April 1999, PT Semen Bosowa Maros telah berhasil memproduksi klinker sendiri, selanjutnya pada tanggal 12 April 1999 berhasil menghasilkan Semen Bosowa dengan menggunakan klinker yang dihasilkan dari penambangan gugus samping eksplorasi Semen Bosowa.

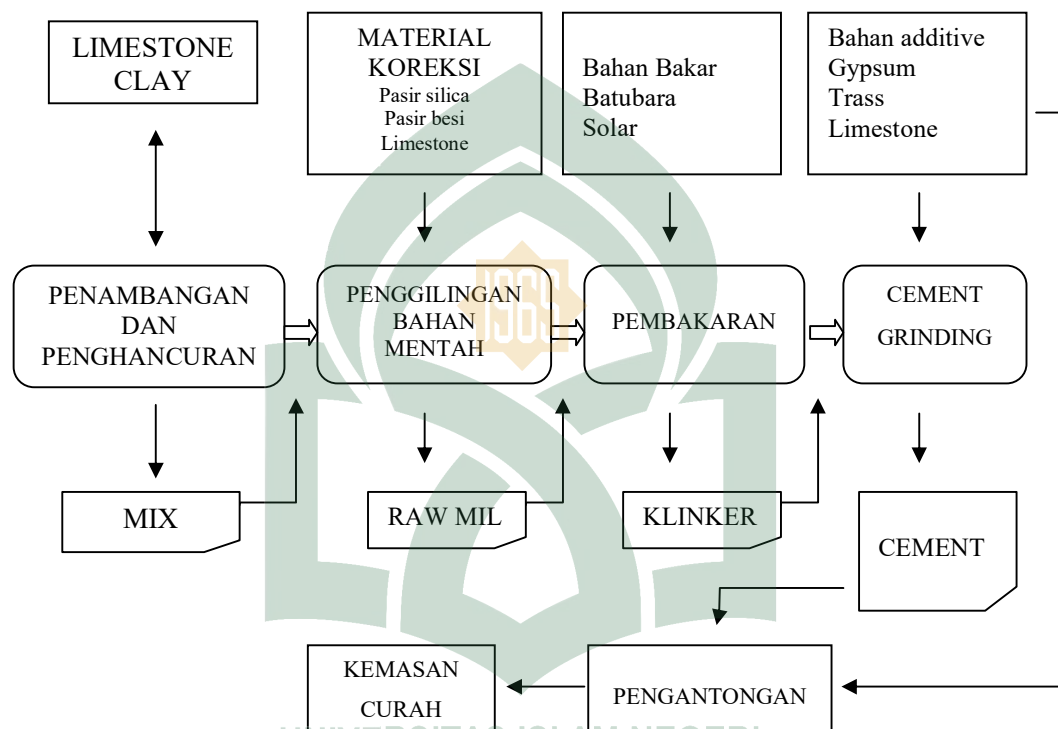
Daerah pemasaran meliputi daerah Sulawesi Selatan dan provinsi lain di daerah kawasan timur Indonesia. Pemasaran semen diperuntukkan bagi pasar dalam negeri sebesar 60% dan bila kebutuhan semen dalam negeri telah terpenuhi, maka 40% dipasarkan untuk ekspor. Kapasitas produksi lain adalah 1,8 juta ton per tahun dan dapat dioptimalkan sampai dengan 2 juta ton per tahun dengan total investasi sebesar 537 Milyar. Produk andalan dari PT Semen Bosowa sendiri adalah semen portland tipe 1 yang dibuat dengan teknologi tinggi dan pabrik yang memiliki fasilitas yang canggih dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga kepuasan

pelanggan dapat terpenuhi dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Berikut adalah gambaran proses produksi perusahaan:

Gambar 1

Proses produksi semen PT Semen Bosowa Maros



Sumber Data: Kantor PT Semen Bosowa Maros Tahun 2017

## 2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Semen Bosowa Maros

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang dinyatakan dalam akta No. 4 dari Notaris Krin Christina Basoeki, S.H, yang berkedudukan di Jakarta, tanggal 7 April 2008, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

a) Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ny. Hj. Ramlah Aksa

Komisaris : H. Sadikin Aksa

b) Dewan Direksi

Direktur Utama : H. M. Aksa Mahmud

Direktur keuangan : H. Erwin Aksa

**3. Struktur Organisasi Perusahaan**

Dalam organisasi dengan segala aktivitas, terdapat hubungan antara orang-orang yang menjalankan aktivitasnya. Makin banyak kegiatan yang dilakukan dalam organisasi, makin kompleks pula hubungan-hubungan dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat keberhasilan untuk menangani kegiatan usaha dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. Dalam hal ini struktur organisasi PT Semen Bosowa Maros diatur dalam Surat Keputusan Direksi.

Struktur organisasi dimaksudkan sebagai alat ukur kontrol dan diharapkan persatuan dan dinamika suatu perusahaan, atau dapat dikatakan bahwa struktur organisasi adalah yang mempersatukan fungsi-fungsi yang ada dalam lingkungan tersebut. Adapun pembagian tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut:

a) *President Director*

*President Director* merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, dan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan dan mengelola perusahaan secara keseluruhan

b) *Management Representative*

*Management Representative* mempunyai tugas membantu *President Director* dalam hal mengatur perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada *President Director*.

c) *Internal Audit*

*Internal Audit* mempunyai tugas membantu *President Director* dalam hal mengaudit segala sesuatu yang terjadi di perusahaan.

d) *Vice President*

*Vice President* mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengoperasian pabrikan, dan bertanggung jawab pada *President Director*.

e) *Marketing Director*

Memiliki tugas mengkoordinir bidang-bidang yang menyangkut dengan masalah pemasaran dan bertanggung jawab kepada *Vice President*.

f) *Finance Director*

Memiliki tugas mengelola keuangan dan pembuatan anggaran perusahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, dan bertanggung jawab langsung kepada *Vice President*, dan membawahi langsung beberapa departemen antara lain *Departement Warehouse* dan *Departement Accounting*.

g) *Administration Director*

Memiliki tugas dalam mengkoordinasikan bidang-bidang yang menyangkut masalah administrasi perusahaan dan masalah sumber daya manusia atau masalah tentang kepegawaian terutama mengenai pengembangan kinerja karyawan pada umumnya. *Administration Director* bertanggung jawab kepada *Vice President* dan membawahi langsung beberapa departemen antara lain *Administration Departement* dan *Purchasing Departement*.

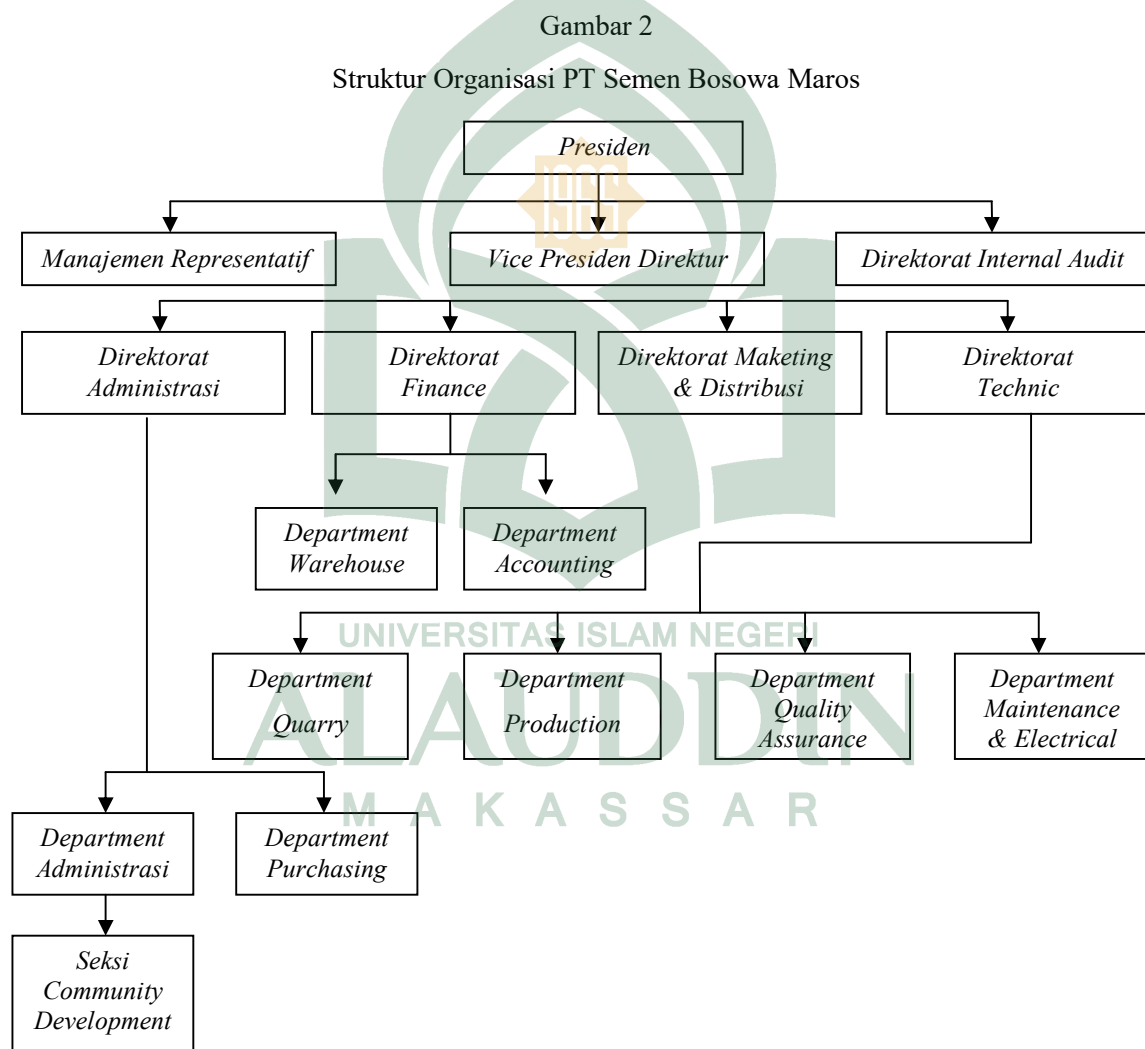
Di tengah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan pada tahun 1991, PT Semen Bosowa Maros telah peduli kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi diseputar konsesi penambangannya. Namun di awal tahun 2009, sebagai upaya dalam menggerakkan roda bisnis dengan menjaga pertumbuhan kinerja keuangan dan menegakkan etika bisnis dengan menerapkan *good corporate governance*, PT Semen Bosowa Maros membuat satu divisi khusus, yakni seksi *Community Development* yang berada dalam garis komandi dan koordinasi Departemen Administrasi. Seksi *Community Development* inilah yang kemudian bertugas untuk melaksanakan segala aktivitas pertanggungjawaban sosial perusahaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kepada seluruh elemen *stakeholder* yang terkait.

h) *Technical Directorat*

*Technical Directorat* memiliki tugas memperbaiki, menjalankan, mengoperasikan dan mengendalikan mutu dari perusahaan terkhusus dalam bidang perteknikan. *Technical Directorat* bertanggungjawab kepada *Vice President* dan membawahi langsung beberapa departemen antara lain *Departement Quarry*,

*Departement Production, Departement Quality Assurance, Departement maintenance & Electical.*

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi PT Semen Bosowa Maros yang dirancang sesuai dengan pembagian dan pengelompokan sistem kerja/kegiatan dan garis koordinasi digambarkan dalam bentuk sebagai berikut:



Sumber Data: Kantor PT Semen Bosowa Maros Tahun 2017

#### 4. Profil Community Development PT Semen Bosowa Maros

Berdasarkan pendekatan kesadaran sosial kemasyarakatan yang tinggi, maka diterapkanlah pendekatan *community development* (comdev) di PT Semen Bosowa Maros (PT SBM) dengan membuat satu seksi yang juga bernama seksi *Community Development* di bawah naungan dan pengawasan Departemen Administrasi. *Community Development* adalah konsep sosiologi yang banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan pertambangan agar lebih berperan dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perkembangan ini mulai jelas terlihat pada era tahun 90-an hingga saat ini. Hal ini tidak hanya sekedar sebagai tuntutan masyarakat agar dilibatkan dalam proses perkembangan perusahaan, namun karena adanya kesadaran baru akan arti pentingnya mendudukkan tanggung jawab perusahaan tidak hanya pada aspek finansial semata, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan, terutama dalam mempertahankan nilai-nilai dan semangat kemandirian masyarakat. Hal yang melandasi kesadaran perusahaan bahwa kesuksesan komersial secara langsung dapat dilihat dari upaya perusahaan mengelola tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitarnya sehingga dapat tercipta lingkungan sosial dan ekonomi yang kondusif bagi upaya pengembangan perusahaan yang berkelanjutan.

PT Semen Bosowa Maros senantiasa merasa sebagai bagian dari komunitas dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat Maros secara khusus dan bertekad menjadi berkah dikancah nasional secara umum. Perhatian PT SBM sebagai industri semen dengan kapasitas 1,8 juta ton per tahun terhadap masyarakat sekitar sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari presentase jumlah

karyawan yang mencapai sekitar 70% adalah penduduk sekitar pabrik. Sejak dini PT SBM berkomitmen terhadap masyarakat dengan membentuk comdev sebagai upaya pendekatan yang proaktif dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat aktifitas perusahaan. Dengan kata lain, comdev merupakan terobosan yang sangat efektif dalam meminimalisir benturan dengan budaya lokal dan kesenjangan sosial ekonomi agar senantiasa terpelihara hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar.

Secara target, *community development* telah menetapkan wilayah-wilayah sasaran yang diistilahkan dengan “ring” yang terbagi dalam 4 (empat) ring. Adapun penetapan Ring 1 dengan alokasi dana comdev tahun berjalan sebesar 50% terdiri dari wilayah sekitar pabrik, yakni Desa Tukamasea dan Desa Baruga. Ring 2 dengan alokasi dana comdev tahun berjalan sebesar 20% terdiri dari wilayah Kecamatan Bantimurung. Ring 3 dengan alokasi dana comdev sebesar 20% meliputi wilayah Kabupaten Maros. Ring 4 dengan alokasi dana comdev sebesar 10% mencakup wilayah Makassar dan Sul-sel. Besaran dana untuk kegiatan comdev tidak dikaitkan dengan peningkatan produksi semen atau omset perusahaan, melainkan lebih dititik beratkan pada upaya meningkatkan manfaat yang bisa diberikan kepada stakeholders terutama masyarakat sekitar. Untuk itu, diharapkan dalam pelaksanaan program, pelibatan masyarakat (*stakeholders*) terutama *beneficiary* (penerima manfaat) yang lebih dominan, serta juga pelibatan secara aktif dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kontraktor, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan pihak eksternal lainnya.



Dengan mengusung paradigma kesinambungan, kemandirian, kesejahteraan, serta pelestarian lingkungan di wilayah sekitar pabrik, comdev telah memfokuskan program dalam enam bidang yang masuk dalam Rencana Kegiatan Jangka Pendek yaitu bidang pendidikan, sosial ekonomi, kesehatan, lingkungan, keagamaan, dan olahraga. Rangkaian program tersebut diharapkan dapat diwujudkan terutama percepatan kesejahteraan yang berkelanjutan menuju masyarakat mandiri dengan tetap menjalin kemitraan dengan berbagai elemen stakeholders.

#### **5. Visi dan Misi Community Development PT Semen Bosowa Maros**

**Visi:** Mewujudkan komunitas yang mandiri melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan pelestarian lingkungan.

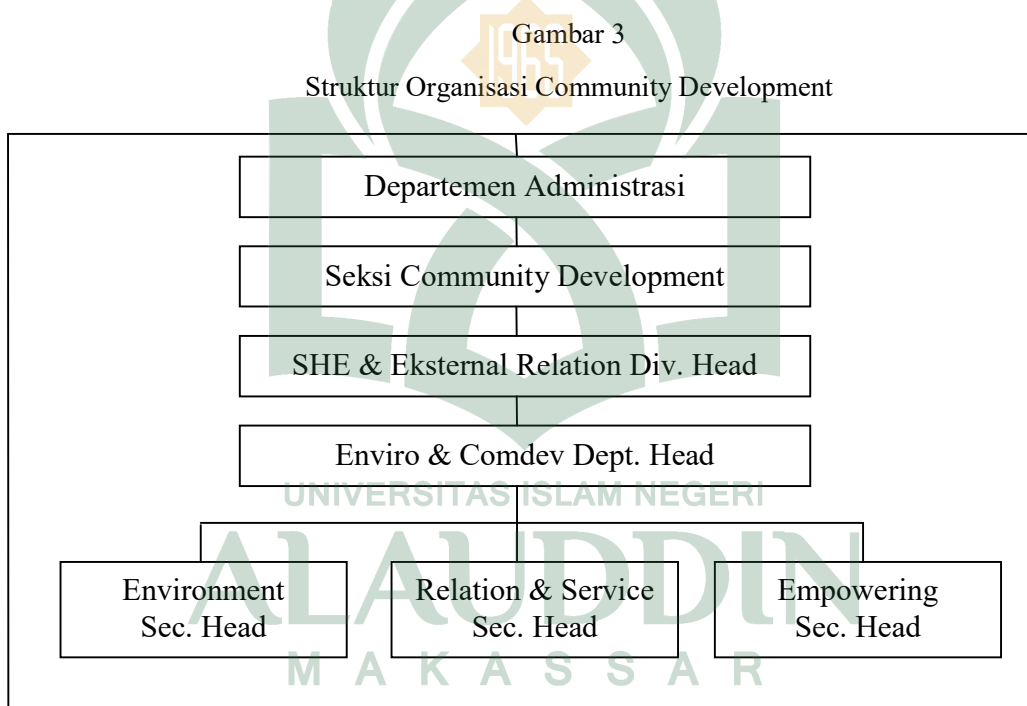
**Misi:**

- a) Merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan melalui partisipasi aktif masyarakat sekitar pabrik.
- b) Mengembangkan potensi masyarakat sekitar, untuk meningkatkan kesejahteraan guna mencapai kemandirian.
- c) Perbaikan infrastruktur masyarakat, guna membantu masyarakat memperbesar akses untuk mencapai kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.
- d) Menjadi berkah bagi masyarakat Indonesia dengan semangat kepoloporan ekonomi wilayah Indonesia timur (*Bosowa Exceclent*).

- e) Meminimalkan perselisihan antara perusahaan dan masyarakat dengan harapan terbentuknya situasi dan kondisi hubungan yang harmonis antara keduanya.
- f) Merumuskan program kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, mencakup pengembangan ekonomi, kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan.

## 6. Struktur Organisasi Community Development

Seksi comdev berada dalam garis komando dan koordinasi Departemen Administrasi, yakni di bawah koordinasi *General Affair*, yang merupakan bagian dari *ekternal relation*. Berikut adalah gambaran organisasi seksi comdev PT Semen Bosowa Maros:



Sumber Data: *Seksi Enviro & Comdev* PT Semen Bosowa Maros Tahun 2017

*a) SHE & Eksternal Relation Div. Head*

Bertanggung jawab untuk membuat perencanaan, mengorganisasikan dan mengarahkan bawahan, serta mengontrol seluruh aktivitas kerja Departemen Enviro & Comdev agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Tugas utamanya ialah pertama, mengelola dan mengontrol aktivitas kerja pada Departemen Enviro & Comdev guna mencapai target kerja secara efektif dan efisien sesuai dengan standar yang ditentukan. Kedua, mendorong terwujudnya usaha-usaha perbaikan berkelanjutan terhadap sistem, proses, dan hasil kerja dari Departemen Enviro & Comdev guna meningkatkan kinerja karyawan secara umum.

*b) Enviro & Comdev Dept. Head*

Bertanggung jawab administrasi pelaksanaan kegiatan sosial yang sifatnya dapat memberikan akses untuk menunjang kemandiriannya berdasarkan kebijakan perusahaan melalui proses administrasi dan dokumentasi serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.

*c) Environment Sec. Head*

Bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan sosial yang dapat memberikan akses untuk menunjang kemandiriannya berdasarkan kebijakan perusahaan, seperti mengelola program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat berdasarkan kebijakan perusahaan dengan cara membuat perencanaan, mengorganisasikan, dan mengarahkan bawahan.

*d) Relation & Service Sec. Head*

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan administrasi kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat berdasarkan kebijakan perusahaan.

*e) Community Relation & Service Team*

Bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan hubungan dan pelayanan antara perusahaan dan masyarakat berdasarkan kebijakan perusahaan dengan mengelola kegiatan dalam membina hubungan harmonis dan memberikan pelayanan antara perusahaan/organisasi dengan komunitas masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial dan saling pengertian berdasarkan kebijakan perusahaan dengan cara membuat perencanaan, mengorganisasikan, dan mengarahkan bawahan.

***B. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Semen Bosowa***

***Maros di Kabupaten Maros***

Secara umum praktik program T.J.S.L. telah dilaksanakan sejak berdirinya perusahaan, meskipun dengan nama yang berbeda. PT Semen Bosowa Maros telah mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap program ini, terbukti dengan adanya divisi khusus yang membidangi pelaksanaan program T.J.S.L. yaitu divisi *Community Development* di bawah naungan Divisi Administrasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris comdev, Asrul Nurdin mengatakan bahwa:

“Aktivitas pertanggung jawaban perusahaan dibagi ke dalam dua jenis bentuk bantuan yaitu: bantuan dana dan bantuan semen kepada empat daerah penerima. Selanjutnya dalam pelaksanaan aktivitas bantuan dananya perusahaan membagi menjadi empat kategori, yaitu: sosial dan ekonomi, pendidikan, keagamaan serta lingkungan.”<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Arul Nurdin, 28 tahun, Sekretaris Comdev, wawancara, Maros, 5 Juni 2018.

Berikut diuraikan lebih rinci mengenai program bantuan T.J.S.L. PT Semen Bosowa Maros dari dokumentasi yang diperoleh:

#### 1. Bantuan Dana T.J.S.L.

Sebagai strategi pelaksanaan program sosial PT Semen Bosowa Maros, divisi comdev mengidentifikasi 4 kategori sebagai fokus utama kegiatan, yaitu: sosial dan ekonomi, pendidikan, keagamaan, serta lingkungan. Melalui program-program yang inovatif dan pelaksanaan yang terkoordinasi dengan baik. Kemudian dalam menjalankan kegiatan-kegiatan T.J.S.L. serta sebagai upaya bagi pihak perusahaan dalam menginformasikan mengenai kegiatan yang mereka lakukan, pihak perusahaan senantiasa berusaha bekerjasama dengan masyarakat sekitar lokasi perusahaan, yang disebut sistem bermitra dengan masyarakat dengan membentuk tim-tim yang terdiri dari masyarakat sekitar, mengingat adanya pengetahuan dan relasi lokal lebih menjamin hasil yang positif untuk kegiatan yang dilaksanakan. Tim-tim tersebut dibagi kedalam dua forum, yaitu Forum Komunikasi Kemitraan-Bosowa Baruga Tukamasea (FKK-BBT) dan Forum Komunikasi Pemuda Bantimurung. Berikut adalah empat kategori program T.J.S.L. yang dilaksanakan PT Semen Bosowa Maros:

##### a) Program Sosial dan Ekonomi

Sebagai bagian dari kontribusi masyarakat PT Semen Bosowa Maros melaksanakan beberapa program-program yang dapat berguna bagi kesejahteraan dan pengembangan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Dalam melaksanakan program ini, PT Semen Bosowa Maros menetapkan sasaran jangka panjang dan

menyelenggarakan berbagai kegiatan rutin dengan bekerjasama dengan ke dua forum yang telah disebutkan sebelumnya.

b) Program Pendidikan

Pada program ini PT Semen Bosowa Maros menyediakan akses pendidikan ke SD, SMP, SMA, SMK, hingga ke Universitas. Melalui kesempatan bersekolah ini, perusahaan membantu para siswa yang membutuhkan agar dapat mengembangkan kemampuan terbaik mereka menjadi orang-orang dewasa yang terampil dan percaya diri. Selain pada pendidikan formal, bantuan diberikan kepada masyarakat buta aksara hingga kelas inspirasi dari beberapa karyawan perusahaan melalui Bosowa Mengajar. Bantuan pembayaran honor dan tunjangan juga masuk dalam kategori program ini.

c) Program Keagamaan

Bentuk realisasi program ini adalah mengeluarkan dana untuk kegiatan seperti pengajian, pengajaran baca tulis Al-Quran, pembentukan remaja masjid, sumbangan paket dan buka bersama pada bulan ramadhan, serta bantuan dana dalam menyemarakkan acara keagamaan seperti maulid, lomba MTQ, dll.

d) Program Lingkungan

Dalam hal ini, PT Semen Bosowa Maros membagi program Lingkungan (*Environment*) menjadi dua bagian yaitu:

1) *Environment Damage*

Bertanggung jawab dalam aktifitas pengrusakan dan seluruh proses pabrik sehingga memenuhi kebutuhan kendali lingkungan dan spesifikasi dari aturan

pemerintah tentang lingkungan hidup dengan melakukan monitoring aktivitas pabrik berdasarkan standar dan kebijakan aturan perundang-undangan lingkungan hidup.

## 2) *Environment Polution*

Bertanggung jawab dalam aktivitas pengelolaan/pemantauan secara langsung terhadap seluruh area pabrik serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga lingkungan hidup dan atau mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sehingga memenuhi kebutuhan kendali lingkungan dan spesifikasi dari aturan pemerintah tentang lingkungan hidup.

Berikut bentuk program kerja T.J.S.L. PT Semen Bosowa Maros tahun 2017, antara lain:

Tabel 1  
Program Kerja T.J.S.L. PT Semen Bosowa Maros Tahun 2017

BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI				
No	Program	Uraian	Due Date	Target/Sasaran
1.	Bantuan Sarana dan Prasarana Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renovasi prasarana pendidikan</li> <li>- Renovasi balai kesehatan masyarakat</li> <li>- Renovasi kantor/desa kelurahan</li> </ul>	Insidentil	Pembenahan infrastruktur desa, kecamatan.
2.	Bantuan Sosial Untuk Acara Hajatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumbangan tenda, kendaraan, dana, dan kursi untuk acara pernikahan</li> <li>- Aqiqah</li> <li>- Kegiatan-kegiatan untuk menyemarakkan hari nasional</li> <li>- Sumbangan untuk bencana alam dan kebakaran</li> </ul>	Insidentil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan dapat terlaksana dengan baik dengan adanya bantuan tersebut</li> <li>- Masyarakat yang terkena musibah dapat terbantuan</li> </ul>
3.	Pembentukan kampung ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Program</li> <li>- Pembenahan Infrastruktur kampung</li> <li>- Penyuluhan dan pelatihan</li> </ul>	Mei	Masyarakat mampu menyediakan pangan jika sewaktu-waktu terjadi krisis pangan
4.	Kegiatan Peningkatan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan keterampilan</li> <li>- Pengembangan tenaga</li> </ul>	Insidentil	Adanya kelompok binaan yang terbentuk untuk

	Masyarakat	kerja lokal - Bantuan modal untuk pengembangan usaha		pengembangan UKM
5.	Budidaya Ikan Air Tawar	- Pelatihan budidaya - Pembudidayaan dan pendampingan	Juni	Adanya kelompok binaan untuk budidaya ikan air tawar
6.	Pembinaan Bengkel Motor	- Pembuatan tempat usaha - Pembinaan kelompok	Januari	Adanya kelompok binaan yang terbentuk untuk kegiatan pengembangan UKM
7.	Kesejahteraan Karyawan	- Menyediakan kelengkapan alat K3 untuk para karyawan - Membangun rumah sakit untuk karyawan	Insidentil	Mensejahterakan karyawan
8.	Budidaya Sayuran Organik	- Penyuluhan pertanian - Pelatihan pembibitan	Januari	Adanya kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan bagi IRT pada waktu luang
9.	Satgas Siaga Bencana Bosowa Semen	- Memberikan bantuan pertolongan pertama - Bantuan fisik	Insidentil	Masyarakat yang terkena dampak musibah dapat terbantuan
10.	Pembinaan pembuatan cendra mata / Rajutan	- Pembinaan kelompok	April	Adanya kelompok binaan yang terbentuk untuk kegiatan pengembangan UKM
11.	Pembinaan pembuatan kursi karet	- Pembinaan kelompok	Agustus	Adanya kelompok binaan yang terbentuk untuk kegiatan pengembangan UKM
12.	Sanitasi Berbasis Masyarakat (Bebas buang air besar sembarang tempat)	- Pembuatan jamban ring 1 - Pembuatan jamban ring 2	Januari	Masyarakat tidak ada lagi yang buang air besar sembarang tempat
13.	Pengembangan Peternakan	- Pembinaan kelompok - Penanaman Rumput Gajah di lahan kosong Bosowa	Maret	Adanya kelompok binaan yang terbentuk untuk kegiatan pengembangan UKM
BIDANG PENDIDIKAN				
1.	Program Beasiswa	- Beasiswa tingkat SD - Beasiswa Khusus Perguruan Tinggi	Juni	- Siswa-siswa yang ada di Ring 1 - Masyarakat yang melanjutkan pendidikan nya di perguruan tinggi negeri dan mempunyai IPK 3,70
2.	Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan dan Pemuda	- Bantuan dana untuk kegiatan sosial kemahasiswaan dan pemuda	Juli	Membentuk karakter jiwa kepemimpinan pemuda di Sekitar pabrik



		- Melaksanakan kegiatan Latihan Kepemimpinan Siswa(i) (Leadership Camp )		
3.	Pembinaan Sanggar Seni	- Pelaksanaan program Pagelaran Seni untuk pemuda di Ring 1 - Mengikuti kegiatan perlombaan seni tingkat Provinsi - Festival seni pada kegiatan adat pernikahan - Pemeliharaan dan pengadaan alat seni	Juni	Adanya komunitas seni yang dapat melestarikan dan mengembangkan budaya seni asli daerahnya
4.	Program Pembinaan di kegiatan Keolahragaan	- Mengadakan Even Turnamen di Wilayah sekitar pabrik - Mengikuti Even Turnamen - Membangun sarana dan prasarana olahraga di Ring 1	Februari	Masyarakat dapat menyalurkan bakat di bidang keolahraganya
5.	Bantuan Dana Pendidikan	- Bantuan dana tenaga pengajar di SD 191 Batunapara - Bantuan dana tenaga pengajar di Pesantren Darul Ulum	Rutin tiap Bulan	Guru-guru honorer yang ada di sekitar pabrik
6.	Seminar	- Pola Hidup sehat - Sosialisasi Pentingnya Tanaman Obat - Sosialisasi Gizi - Penyuluhan bahaya Narkoba - Penyuluhan berlalulintas	Februari Februari  Februari Mei Mei	Masyarakat mendapat pemahaman dan pengetahuan tambahan dari seminar tersebut
BIDANG KEAGAMAAN				
1.	Semarak Ramdhan	- Pelaksanaan MTQ tingkat Desa dan Kecamatan - Pembagian Sembako dan Zakat - Buka Puasa Bersama masyarakat sekitar pabrik - Halal Bi halal	Hari Peryaan kegiatan keagamaan	- Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan isi kandungan Al-Qur'an. - Melestarikan seni dan budaya Qur'ani masyarakat sekitar pabrik
2.	Perayaan hari besar keagamaan	- Pemotongan Hewan Qurban saat Hari Raya Idul Adha	Hari Peryaan kegiatan keagamaan	Masyarakat mengetahui dan memaknai nilai-nilai keagamaan berdasarkan sejarah Keislaman

3.	Bantuan Dana Pembinaan Keagamaan	- Memberikan santunan kepada guru mengaji tradisional di sekitar pabrik	Ruti tiap Bulan	Guru-guru mengaji merasa terbantuan dalam hal kegiatan kesehariannya
4.	Safari Jumat	- Melakukan kegiatan Shalat Jumat bersama masyarakat sekitar pabrik	Tiap 2 kali perbulan	Silaturahmi dengan masyarakat sekitar pabrik
BIDANG LINGKUNGAN				
1.	Pelatihan Pegawai	- Pelatihan dasar - Pelatihan khusus	Juni	Memberikan pelatihan kepada pegawai agar lebih memahami cara bekerja
2.	Pemeliharaan jalan/jembatan/irigasi	- Perbaikan jalan - Pembuatan jembatan - Pembuatan irigasi	September	Memperbaiki kerusakan yang timbul akibat perusahaan
3.	Daur Ulang	- Membuat program daur ulang	Bulanan	Agar limbah yang timbul akibat perusahaan dapat dimanfaatkan
4.	Pemantauan dan pengukuran Lingkungan	- Pemantauan dampak yang timbul akibat perusahaan - Pengukuran yang dibutuhkan lingkungan sekitar	Bulanan	Agar dapat mencegah terjadinya kerusakan
5.	Penyediaan Air Bersih	- Bantuan air bersih	Insidentil	Menyediakan air bersih kepada masyarakat yang tercemar akibat perusahaan
6.	Pengelolaan Limbah	- Pemanfaatan limbah B3 - Pemusnahan limbah B3	Bulanan	Mengelola limbah yang timbul agar tidak tercemar
7.	Penangkaran Debu	- Membuat penangkaran debu di sekitar perusahaan	Insidentil	Agar debu yang timbul akibat perusahaan tidak mengganggu masyarakat

Sumber Data: Kantor PT Semen Bosowa Maros Tahun 2017

## 2. Bantuan Sumbangan Semen PT Semen Bosowa Maros

Selain memberikan bantuan dalam bentuk dana dan kegiatan masyarakat, PT Semen Bosowa Maros juga memberikan bantuan dalam bentuk sumbangan semen untuk beberapa pembangunan yang dilakukan masyarakat sekitar. Pembagian sumbangan disalurkan untuk sektor Ring, sektor reguler umum (sarana/prasaran umum diluar sektor ring), sektor *foundation* (perumahan, masjid, serta instansi-instansi), sektor *flat storage* (luar Sul-Sel).

***C. Perwujudan Pelaksanaan Program T.J.S.L. PT Semen Bosowa Maros Di Kabupaten Maros***

**1. Bantuan Dana T.J.S.L. PT Semen Bosowa Maros**

**a) Program Sosial dan Ekonomi**

Dari tiga belas bentuk program kerja PT Semen Bosowa Maros di bidang sosial dan ekonomi, hanya tujuh yang dapat terealisasi, antara lain:

**1) Bantuan sarana dan prasarana umum**

PT Semen Bosowa Maros sangat berperan aktif dalam pembangunan sarana dan prasarana umum diantaranya renovasi prasarana pendidikan, renovasi balai kesehatan masyarakat, renovasi kantor desa/kelurahan, pembangunan/renovasi sarana olahraga, renovasi rumah kumuh.

**2) Bantuan sosial untuk acara hajatan dan kedudukan masyarakat**

Beberapa bantuan yang menjadi program dalam kategori ini berupa: sumbangan tenda, kendaraan, dana, dan kursi untuk acara pernikahan keagamaan, aqiqah, musibah kematian karyawan dan masyarakat sekitar, kegiatan-kegiatan untuk menyemarakkan hari nasional, sumbangan untuk bencana alam dan kebakaran.

**3) Kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat**

Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, PT Semen Bosowa Maros memberikan bantuan berupa pendidikan dan pelatihan keterampilan, bantuan untuk komoditi lokal, bantuan modal untuk pengembangan usaha, pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja lokal, hingga pengembangan potensi pemuda sekitar.

#### 4) Kesejahteraan karyawan

Bentuk realisasi program ini adalah dengan melakukan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kemampuan yang diperuntukkan bagi karyawan PT Semen Bosowa Maros serta menyediakan kelengkapan alat K3 untuk karyawan seperti sepatu lapangan, masker, dan helm, hingga membangun rumah sakit untuk para karyawan dan setiap pengobatan tidak dikenakan biaya.

#### 5) Budidaya Sayuran Organik

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud masyarakat diajarkan untuk melestarikan hidup sehat dengan mengkonsumsi Sayuran Organik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan kemitraan dikhususkan kepada Kelompok Wanita Tani yang merupakan Ibu Rumah tangga dan yang menyiapkan konsumsi keluarganya.. Penerima manfaat dari program ini ada 680 Keluarga yang ada di Desa Baruga dan Desa Tukamasea. Bentuk kegiatannya adalah Penyuluhan pertanian oleh BPP Bantimurung dan Dinas Pertanian Kab. Maros. Pelatihan Pembibitan, Pelatihan Biopestisida dan pupuk organik, dan Pelatihan pembuatan bibit.

#### 6) Satgas Siaga Bencana Bosowa Semen

Program Satgas Siaga Bencana PT. SBM adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tanggap cepat dan pertolongan pertama terhadap bencana alam yang dialami oleh masyarakat yang berada disekitar pabrik PT SBM. Bantuan-bantuan yang diberikan seperti obat-obatan dan keperluan sehari-hari.

### 7) Sanitasi Berbasis Masyarakat

Program ini bekerja sama dengan Dinas kesehatan dan Danramil Bantimurung. Program ini awalnya dilakukan karena melihat pola masyarakat yang kebanyakan masih buang air besar disembarang tempat terutama yang bermukim dipinggir sungai. Maka dari itu dibuatkan program mengubah pola pikir tersebut dengan cara membuatkan jamban untuk keluarga yang belum memiliki. Jumlah penerima manfaat kegiatan ini adalah 700 KK dan program masih terus berlangsung sampai saat ini.

#### b) Program Pendidikan

Dari enam program kerja T.J.S.L. di bidang pendidikan hanya tiga yang dapat terealisasi, diantaranya:

#### 1) Beasiswa Reguler Tingkat SD dan Beasiswa Masuk Perguruan Tinggi untuk Masyarakat kurang Mampu

Program beasiswa reguler tingkat SD ini dilaksanakan dengan tujuan memotivasi Siwa/siswi untuk terus meningkatkan prestasi dari segi. Program ini awalnya dilakukan karena melihat siswa(i) yang ada di Daerah sekitar pabrik belum mampu untuk bersaing dengan siswa-siswa yang berada diperkotaan. 'Tiap tahun ada sekitar 50 Sisiwa yang berprestasi menerima Beasiswa ini.

Sedangkan program beasiswa khusus perguruan tinggi dilaksanakan karena masih banyaknya masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikanya diperguruan tinggi. Jumlah penerima manfaat kegiatan ini adalah 12 Orang dari masyarakat yang

kurang mampu yang disekolahkan di Politeknik Bosowa sampai selesai dengan jurusan sesuai keinginan.

## 2) Pembinaan Sanggar Seni

Program Pembinaan Sanggar Seni yaitu kegiatan pengembangan seni local masyarakat dengan membina salah satu sanggar seni yakni Salokoa Maros. Sanggar seni saloka maros terbentuk pada tahun 2014 yang awalnya hanya sebagai komunitas seni dan PT Semen Bosowa melihat potensi itu dan melakukan pembinaan dan terbentuklah sanggar seni salokoa. Anggota dari sanggar seni ini pada tahun 2014 sebanyak 15 orang dan pada tahun 2015 telah ada 35 Orang yang berasal dari Desa Baruga dan Desa Tukamasea. Sanggar seni ini melakukan pembinaan di Bidang musik daerah, tari daerah, puisi daerah, teater cerita rakyat dan seni rupa. Prestasi sanggar seni adalah juara umum 2 tahun berturut-turut dalam Festival Budaya Tradisional tingkat Sul-sel yang diadakan di Univ. Hasanuddin.

## 3) Bantuan Dana Pendidikan

Program ini dilakukan dengan memberikan bantuan dana kepada tenaga pengajar/guru honorer yang berada di sekitar pabrik, khususnya di SD 191 Batunapara dan Pesantren Darul Ulum.

## c) Program Keagamaan

Kegiatan-kegiatan keagamaan juga rutin kita lakukan tiap tahun. Ini dilaksanakan untuk meningkatkan keimanan dan Ketakwaan kepada Sang Pencipta kita. Sesuai dengan Visi Bosowa Corporate adalah Bekerja, Belajar dan Berdoa. Beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah dilaksanakan: Lomba Hafidz

Quran Tingkat Kecamatan, Safari Jumat dan Pemberian Bantuan Pembangunan Mesjid, Buka Puasa Bersama Masyarakat sekitar Pabrik, Pemberian Bantuan Hewan Qurban Rutin 13 Ekor/ Tahun, Peringatan Maulid Rasulullah SAW.

d) Program Lingkungan

Adapun program lingkungan PT Semen Bosowa Maros yang terealisasi antara lain: pelatihan pegawai, daur ulang, pemantauan dan pengukuran lingkungan, serta pengelolaan limbah.

Berikut program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Bosowa Maros tahun 2017 yang terealisasi:

Tabel 2

Perwujudan Pelaksanaan T.J.S.L. PT Semen Bosowa Maros Tahun 2017

BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI				
No	Program	Uraian	Ya	Tidak
1.	Bantuan Sarana dan Prasarana Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renovasi prasarana pendidikan</li> <li>- Renovasi balai kesehatan masyarakat</li> <li>- Renovasi kantor/desa kelurahan</li> </ul>	Y	
2.	Bantuan Sosial Untuk Acara Hajatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumbangan tenda, kendaraan, dana, dan kursi untuk acara pernikahan</li> <li>- Aqiqah</li> <li>- Kegiatan-kegiatan untuk menyemarakkan hari nasional</li> <li>- Sumbangan untuk bencana alam dan kebakaran</li> </ul>	Y	
3.	Pembentukan kampung ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Program</li> <li>- Pembenahan Infrastruktur kampung</li> <li>- Penyuluhan dan pelatihan</li> </ul>		T
4.	Kegiatan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan keterampilan</li> <li>- Pengembangan tenaga kerja lokal</li> <li>- Bantuan modal untuk pengembangan usaha</li> </ul>	Y	
5.	Budidaya Ikan Air Tawar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan budidaya</li> <li>- Pembudidayaan dan pendampingan</li> </ul>		T

6.	Pembinaan Bengkel Motor	- Pembuatan tempat usaha - Pembinaan kelompok		T
7.	Kesejahteraan Karyawan	- Menyediakan kelengkapan alat K3 untuk para karyawan - Membangun rumah sakit untuk karyawan	Y	
8.	Budidaya Sayuran Organik	- Penyuluhan pertanian - Pelatihan pembibitan	Y	
9.	Satgas Siaga Bencana Bosowa Semen	- Memberikan bantuan pertolongan pertama - Bantuan fisik	Y	
10.	Pembinaan pembuatan cendra mata / Rajutan	- Pembinaan kelompok		T
11.	Pembinaan pembuatan kursi karet	- Pembinaan kelompok		T
12.	Sanitasi Berbasis Masyarakat (Bebas buang air besar sembarang tempat)	- Pembuatan jamban ring 1 - Pembuatan jamban ring 2	Y	
13.	Pengembangan Peternakan	- Pembinaan kelompok - Penanaman Rumput Gajah di lahan kosong Bosowa		T
BIDANG PENDIDIKAN				
1.	Program Beasiswa	- Beasiswa tingkat SD - Beasiswa Khusus Perguruan Tinggi	Y	
2.	Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan dan Pemuda	- Bantuan dana untuk kegiatan sosial kemahasiswaan dan pemuda - Melaksanakan kegiatan Latihan Kepemimpinan Siswa(i) (Leadership Camp)		T
3.	Pembinaan Sanggar Seni	- Pelaksanaan program Pagelaran Seni untuk pemuda di Ring 1 - Mengikuti kegiatan perlombaan seni tingkat Provinsi - Festival seni pada kegiatan adat pernikahan - Pemeliharaan dan pengadaan alat seni	Y	
4.	Program Pembinaan di kegiatan Keolahragaan	- Mengadakan Even Turnamen di Wilayah sekitar pabrik - Mengikuti Even Turnamen		T



		- Membangun sarana dan prasarana olahraga di Ring 1		
5.	Bantuan Dana Pendidikan	- Bantuan dana tenaga pengajar di SD 191 Batunapara - Bantuan dana tenaga pengajar di Pesantren Darul Ulum	Y	
6.	Seminar	- Pola Hidup sehat - Sosialisasi Pentingnya Tanaman Obat - Sosialisasi Gizi - Penyuluhan bahaya Narkoba - Penyuluhan berlalulintas		T
BIDANG KEAGAMAAN				
1.	Semarak Ramdhan	- Pelaksanaan MTQ tingkat Desa dan Kecamatan - Pembagian Sembako dan Zakat - Buka Puasa Bersama masyarakat sekitar pabrik - Halal Bi halal	Y	
2.	Perayaan hari besar keagamaan	- Pemotongan Hewan Qurban saat Hari Raya Idul Adha	Y	
3.	Bantuan Dana Pembinaan Keagamaan	- Memberikan santunan kepada guru mengaji tradisional di sekitar pabrik	Y	
4.	Safari Jumat	- Melakukan kegiatan Shalat Jumat bersama masyarakat sekitar pabrik	Y	
BIDANG LINGKUNGAN				
1.	Pelatihan Pegawai	- Pelatihan dasar - Pelatihan khusus	Y	
2.	Pemeliharaan jalan/jembatan/irigasi	- Perbaikan jalan - Pembuatan jembatan - Pembuatan irigasi		T
3.	Daur Ulang	- Membuat program daur ulang	Y	
4.	Pemantauan dan pengukuran Lingkungan	- Pemantauan dampak yang timbul akibat perusahaan - Pengukuran yang dibutuhkan lingkungan sekitar	Y	
5.	Penyediaan Air Bersih	- Bantuan air bersih		T
6.	Pengelolaan Limbah	- Pemanfaatan limbah B3 - Pemusnahan limbah B3	Y	
7.	Penangkaran Debu	- Membuat penangkaran debu di sekitar perusahaan		T

Sumber Data: Kantor PT Semen Bosowa Maros Tahun 2017

## 2. Program Bantuan Semen

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan membantu peningkatan infrastruktur di wilayah Ring 1 yang mencakup Desa Baruga dan Desa Tukamasea dan Ring 2 untuk wilayah Kec. Bantimurung. Jumlah bantuan yang diberikan adalah 500 Zak/ Bulan untuk wilayah Ring 1 dan 150 Zak/ Bulan untuk wilayah Ring 2.

Berdasarkan hasil perwujudan di atas maka langkah selanjutnya dilakukan perhitungan guna memperoleh hasil yang akan menjadi dasar kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Pengukuran hasil penilaian akan dihitung dengan menggunakan rumus champion sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah jawaban "ya"}}{\text{Jumlah seluruh program T.J.S.L}} \times 100$$

Hasil penilaian menunjukkan bahwa jawaban “ya” untuk indikator bidang sosial dan ekonomi sebanyak 7 poin dari 13 aspek program, indikator bidang pendidikan sebanyak 3 poin dari 6 aspek program, indikator bidang keagamaan sebanyak 4 poin dari 4 aspek program, dan indikator bidang sosial sebanyak 4 poin dari 7 aspek program. Sehingga dari 30 program T.J.S.L. hanya 18 poin yang dipenuhi oleh PT Semen Bosowa Maros. Berikut adalah perhitungan berdasarkan rumus yang telah dikemukakan sebelumnya:

$$\frac{18}{30} \times 100 = 60 \%$$

Verifikasi pengambilan keputusan dari persentase nilai akhir yaitu:

0% - 30% = tidak sesuai

30% - 60% = kurang

60% - 80% = cukup

80% - 100% = sesuai

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa PT Semen Bosowa Maros dalam penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan memperoleh persentase 60 % . nilai persentase ini menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Bosowa Maros masuk dalam kategori kurang, dengan kesimpulan bahwa penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Bosowa Maros kurang terlaksana dan tidak sesuai dengan program yang telah dianggarkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros dibagi ke dalam dua jenis bentuk bantuan yaitu bantuan dana dan bantuan semen. Dalam pelaksanaan aktivitas bantuan dananya PT SBM membagi menjadi empat kategori, yaitu: sosial dan ekonomi, pendidikan, keagamaan serta lingkungan.
2. Adapun perwujudan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros memperoleh persentase 60 % . Nilai persentase ini menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Bosowa Maros masuk dalam kategori kurang, dengan kesimpulan bahwa penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Bosowa Maros kurang terlaksana dan tidak sesuai dengan program yang telah dianggarkan.

#### ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan hasil simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, adapun saran dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Bosowa Maros lebih efektif, sebaiknya PT SBM melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap kebutuhan mendesak masyarakat yang perlu mendapatkan prioritas bagi mereka, seperti kegiatan kepemudaan, penyediaan air bersih, penangkaran debu, serta pemeliharaan jalan/jembatan/irigasi.
2. PT Semen Bosowa Maros sebaiknya melaksanakan sepenuhnya program yang telah direncanakan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan agar program T.J.S.L. tersebut lebih berkualitas dan tepat sasaran serta masyarakat pun dapat diuntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Prima Mulyasar. *Cyber Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. V; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Asikin, Zainal dan Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Asyhadie, Zaeni dan Sutrisno, Budi. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Budi Untung, Henrik. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Fajar, Mukti. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya R. dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Edisi I, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ibrahim, Johannes. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, S.T. Chrstine. *Pokok-Pokok Pengetahun Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, S.T. Chrstine. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran Keluarga*. Bandung: Kemenag, 2012.

Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1985.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia*. Jilid 1, Jakarta: Djambatan, 1992.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia*. Jilid 2, Jakarta: Djambatan, 1995.

Soejono., *Dasar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.

Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

#### **Perundang-undangan :**

*UU RI Nomor 40 Tahun 2007 & PP No.47 RI Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan III, Bandung: Citra Umbara, 2013.

#### **Media Sosial :**

Rakyatku.Com, Maros. Pada hari senin, 18 September 2017 23:41, diunduh sabtu, 19 Mei 2018 pukul 21:49. (news.rakyatku.com)

Suastuti, Eni. *Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR*. *Rechtidde Jurnal Hukum*, Vol. 9. No. 2, Desember 2014.

Sukarni. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan Iklim Penanaman Modal di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 5 Nomor 2-Juni 2008.

Sulaeman. *Badamai Law Jurnal: Asas Kepatutan Dalam T.J.S.L*. Vol. 1: April 2016.

## LAMPIRAN

### 1. Budidaya Sayuran Organik



Documentasi Budidaya Sayuran Organik dan Pelatihan

### 2. Beasiswa Masuk Perguruan Tinggi untuk Masyarakat kurang Mampu



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### 3. Pembinaan Sanggar Seni





#### 4. Sanitasi Berbasis Masyarakat



#### 5. Beasiswa Reguler Tingkat SD



#### 6. Satgas Siaga Bencana Bosowa Semen



## 7. Program Bantuan Semen Reguler



Ket: Bantuan Semen Untuk  
Pembangunan Menara Mesjid Dusun  
Kassi Desa Baruga



Ket: Bantuan Semen Untuk  
Pembuatan Bak Penampungan Air  
Bersih Desa Tukamasea

## 8. Program Beasiswa Bosowa School



Ket: Penjaringan Beasiswa



Ket: Siswa(i) yang lolos Beasiswa  
Bosowa School

## 9. Kegiatan Keagamaan



Ket: Lomba Hafidz Quran Tingkat Kecamatan



Ket: Safari Jumat dan Pemberian Bantuan Pembanguna Mesjid



Ket: Buka Puasa Bersama Masyarakat sekitar Pabrik



Ket: Pemberian Bantuan Hewan Qurban Rutin 13 Ekor/ Tahun



Ket: Peringatan Maulid Rasulullah SAW



Ket: MTQ Tingkat Kecamatan

**SURAT KETERANGAN**  
NO. : RD/SK/SS/18 -0155

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Ikhwan Setiawan  
NIM : 10400114142  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Institusi : Universitas Islam Alauddin Makassar  
Judul Skripsi : Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan  
Pada PT Semen Bosowa Maros

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di PT. Semen Bosowa Maros pada tanggal 3 Juni 2018 s/d 03 Juli 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT SEMEN BOSOWA MAROS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

  
**SUHARTO SAGA**

Head Of Recruitment & Development Dept.

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Peneliti : Ikhwan Setiawan  
Profesi/Status : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Griya Antang Harapan Makassar
  
2. Nama Informan : ARUL NURDIN  
Profesi/Jabatan : SEKRETARIS COMDEV  
Umur : 28 THN  
Alamat : BTN - TELKOMAS

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan), telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 3 Juni 2018 sampai 3 Juli 2018, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara, peneliti tetap berpedoman pada kaidah wawancara dengan pedoman wawancara, serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.

Maros, 5 Juni 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Peneliti Informan

Ikhwan Setiawan ARUL NURDIN



## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Peneliti : Ikhwan Setiawan  
Profesi/Status : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmui Hukum  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Griya Antang Harapan Makassar
  
2. Nama Informan : MUH. AMIN  
Profesi/Jabatan : MASYARAKAT  
Umur : 32 TAHUN  
Alamat : DESA BARUGA, BANTIMURUNG - MAROS

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan), telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 3 Juni 2018 sampai 3 Juli 2018, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara, peneliti tetap berpedoman pada kaidah wawancara dengan pedoman wawancara, serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.

Maros, 7 Juni 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Peneliti

Informan

  
Ikhwan Setiawan

  
MUH. AMIN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ikhwan Setiawan sering disapa Ikhwan, dilahirkan di Kabupaten Barru tepatnya di Desa Kampung Baru, Kecamatan Soppeng Riaja pada hari rabu tanggal 13 Februari 1997. Anak kedua dari tiga bersaudara pasangan dari Drs. Salman M dan Adriana.

Penyusun menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ajakkang Barat pada tahun 2008. Pada tahun itu juga penyusun melanjutkan pendidikan di MTs Putra DDI Mangkoso. Penyusun menyelesaikan studinya pada tahun 2011. Pada tahun itu juga penyusun melanjutkan pendidikan di MA Putra DDI Mangkoso dan lulus pada tahun 2014. Penyusun kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar fakultas Syari'ah dan Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum dan mengambil konsentrasi Hukum Perdata.

Selama kuliah, penyusun aktif pada salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat berbasis bahasa inggris yakni New Generation Club dan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Umum periode 2016/2017. Penyusun juga turut serta dalam beberapa lomba peradilan semu tingkat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Sampai dengan penyusunan skripsi ini, penyusun masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif program S1 reguler pada fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.